

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya dengan rahmat dan pertolongan-NYA lah penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2021 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan, sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta menciptakan Good Governance dan Clean Government. Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara garis besar menyajikan informasi mengenai gambaran organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar, serta implementasi dokumen perencanaan dan kinerja seperti Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), serta Perjanjian Kinerja.

Pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar merupakan hasil kerjasama dan kerja keras dari berbagai pihak. Akhir kata semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar tahun 2021 ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2021 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Blitar, Januari 2022

Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Blitar

TOTO ROBANDIYO, S.Sos., M.Si.

Pembina Tk.I

NIP. 196612041996031004

IKHTISAR EKSEKUTIF

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar merupakan unsur pendukung tugas Walikota dibidang kesatuan bangsa, politik dan penanggulangan bencana. Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2016-2021 yang di dalamnya memuat Visi dan Misi Pemerintah Kota Blitar, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar mengemban dua misi Pemerintah Kota Blitar, yang pertama misi ke-1: “Meningkatkan Aktualisasi Nilai-nilai religius Dalam Kehidupan Bermasyarakat”, dengan tujuan “Meningkatkan kerukunan umat beragama”; yang kedua misi ke-5 “Meningkatkan Keharmonisan Sosial Dengan Semangat Rukun Agawe Santoso” dengan tujuan “Meningkatkan Tata Kehidupan Masyarakat yang Tertib dan Tentram”.

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, ditetapkanlah empat poin sasaran yang merupakan kinerja utama dari Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar yang harus dicapai sesuai target. Berikut empat sasaran dan capaian kinerja yang telah dicapai pada tahun 2021:

1. Meningkatnya Komunikasi dan Silaturahmi Antar Umat Beragama, dengan target 100% telah tercapai 100%.
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat untuk menciptakan kondisi yang aman dan tentram, ditetapkan target sebesar 100% dan telah memperoleh capaian kinerja sesuai target yaitu 100%.
3. Meningkatnya ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana, capaian kinerjanya melebihi 100% yaitu sebesar 125%, hal ini dikarenakan realisasinya mencapai 100% melebihi target yang ditetapkan sebesar 80%.
4. Meningkatnya pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Partai Politik, capaian kinerja melebihi 100% yaitu sebesar 111%, hal ini disebabkan realisasi yang dicapai melebihi target yang ditetapkan dari 80% tercapai 88,8%.

Laporan Kinerja Instansi Pemerinah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja utama yang dalam pelaksanaannya dijabarkan dalam program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran oleh seluruh bidang. Pada Tahun 2021 anggaran yang teralokasi untuk Badan Kesatuan

Bangsa Politik dan Penanggulangan Bencana Kota Blitar sebesar Rp. 9.140.255.883,00 telah terealisasi sebesar Rp. 7.513.826.898,00 atau 82,21 %. Program yang dilaksanakan dalam mengelola dana tersebut terdiri dari 7 (tujuh) program, yaitu:

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.099.499.428	3.326.577.953	81,15%
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	622.669.700	528.187.800	84,83%
3	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	1.705.576.600	1.608.321.000	94,30%
4	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	324.871.300	158.702.400	48,85%
5	Program Penanggulangan Bencana	1.442.978.980	1.066.179.970	73,89%
6	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	862.184.175	775.801.475	89,98%
7	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	82.475.700	50.056.300	60,69%
	TOTAL	9.140.255.883	7.513.826.898	82,21%

Dari Keempat sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Penanggulangan Bencana Kota Blitar, semuanya telah mencapai target dan efisien. Berikut tabel capaian kinerja, anggaran dan tingkat efisiensi:

Sasaran	Indikator Sasaran	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya komunikasi dan silaturahmi antar umat beragama	Persentase kejadian SARA yang tertangani	100	84,83	1,18
Meningkatnya partisipasi masyarakat untuk menciptakan kondisi yang aman dan tentram	Persentase Konflik Sosial yang Tertangani	100	87,03	1,15

Meningkatnya ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana	Persentase Kelurahan Tangguh Bencana	125	73,89	1,69
Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Partai Politik	Persentase Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Politik Yang Terdaftar	111	87,42	1,27

Dari analisis dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja utama yang telah ditetapkan dalam rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Penanggulangan Bencana Kota Blitar tahun 2021 dapat dikatakan sangat berhasil walaupun masih dijumpai banyak kendala/hambatan dalam pelaksanaannya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	2
C. MAKSUD DAN TUJUAN	8
D. DASAR HUKUM	8
E. ASPEK-ASPEK STRATEGIS	11
F. ISU-ISU STRATEGIS	13
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	14
A. RENCANA STRATEGIS 2016-2021	14
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA/ SASARAN	20
1. ANALISIS CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN TARGET DAN REALISASI TAHUN 2021	22
2. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020 – 2021	38
3. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA S.D AKHIR PERIODE RENSTRA	39
4. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN REALISASI NASIONAL (TARGET SPM)	40
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN (COST PER OUTCOME).....	47
1. ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN	52
2. PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN	53
3. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA	55
C. PRESTASI/ PENGHARGAAN	55
BAB IV PENUTUP	56
A. KESIMPULAN	56
B. LANGKAH PERBAIKAN	58

LAMPIRAN – LAMPIRAN

- A. Rencana Strategis OPD Tahun 2016-2021 (terbaru)
- B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021
- C. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021
- D. Pengukuran Kinerja Tahun 2021

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dinyatakan bahwa Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Sesuai pasal 5 huruf e Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 disebutkan bahwa pelaporan kinerja merupakan salah satu unsur penyelenggaraan SAKIP.

Untuk selanjutnya petunjuk teknis Pelaporan Kinerja diatur secara detail dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini diamanatkan bahwa Kepala OPD menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Gubernur/ Bupati/ Walikota, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dengan demikian, untuk mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang diliputi semangat akuntabilitas, Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Penanggulangan Bencana Kota Blitar secara periodik setiap tahun menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai sarana mempertanggungjawabkan pelaksanaan Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Penanggulangan Bencana Kota Blitar yang tertuang dalam bentuk Perjanjian Kinerja kepada pemberi mandat, dalam hal ini adalah pertanggungjawaban kepada Walikota Blitar. Di dalam laporan kinerja ini disampaikan hasil capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Penanggulangan Bencana Kota Blitar secara terukur, sehingga LKjIP ini diproyeksikan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan alat pendorong terwujudnya misi ke-1 dan ke-5 Pemerintah Kota Blitar yang diemban oleh

Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Penanggulangan Bencana Kota Blitar, yaitu: Meningkatkan Aktualisasi Nilai-nilai Religius Dalam Kehidupan Bermasyarakat dan Meningkatkan Keharmonisan Sosial Dengan Semangat Rukun Agawe Santoso. Dalam perspektif yang lebih luas, LKjIP ini dapat berfungsi sebagai media pertanggungjawaban Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Penanggulangan Bencana Kota Blitar.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti Peraturan Walikota Blitar Nomor 39 Tahun 2014 tentang tugas pokok fungsi dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar. Kedudukan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur pendukung tugas Walikota dibidang kesatuan bangsa, politik dan penanggulangan bencana, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui Sekretaris Daerah. Adapun tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan penanggulangan bencana daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan penanggulangan bencana berdasar peraturan perundang-undangan ;
2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum pada bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan penanggulangan bencana;
3. pengkoordinasian penyelenggaraan kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan penanggulangan bencana;
4. penyelenggaraan tugas kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, serta bina penanggulangan bencana ;
5. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, serta bina penanggulangan bencana;

6. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, serta bina penanggulangan bencana;
7. pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, pengelolaan anggaran dan pelaksanaan tugas badan;
8. penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan Badan ;
9. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kinerja Badan;
10. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya;

Untuk melaksanakan fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan penanggulangan bencana daerah mempunyai kewenangan:

1. penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan, penghargaan kebangsaan kota, ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya serta penegakan Hak Azasi Manusia;
2. pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan, penghargaan kebangsaan kota, ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya serta penegakan Hak Azasi Manusia ;
3. pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan, penghargaan kebangsaan kota, ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya serta penegakan Hak Azasi Manusia;
4. pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan,

- bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan, penghargaan kebangsaan kota, ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya serta penegakan Hak Azasi Manusia;
5. peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan, penghargaan kebangsaan kota, ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya serta penegakan Hak Azasi Manusia ;
 6. koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan, pengawasan orang asing dan lembaga asing kota, pencegahan dan penanganan konflik pemerintahan, konflik sosial, serta pencegahan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan kota ;
 7. pelaksanaan kegiatan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan, pengawasan orang asing dan lembaga asing kota, pencegahan dan penanganan konflik pemerintahan, konflik sosial, serta pencegahan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan kota;
 8. pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan, pengawasan orang asing dan lembaga asing kota, pencegahan dan penanganan konflik pemerintahan, konflik sosial, serta pencegahan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan kota;
 9. pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan, pengawasan orang asing dan lembaga asing kota, pencegahan dan penanganan konflik pemerintahan, konflik sosial, serta pencegahan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan kota;
 10. peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan, pengawasan orang asing dan lembaga asing kota, pencegahan dan penanganan konflik

pemerintahan, konflik sosial, serta pencegahan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan kota;

11. koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada kota ;
12. pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada kota ;
13. pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada kota ;
14. pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada kota ;
15. peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada kota ;
16. koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang hubungan antar lembaga/organisasi kemasyarakatan, legislatif, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga penyelenggara pemilihan umum ;
17. pelaksanaan kegiatan di bidang hubungan antar lembaga/organisasi kemasyarakatan, legislatif, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga penyelenggara pemilihan umum;
18. pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di

bidang hubungan antar lembaga/organisasi kemasyarakatan, legislatif, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga penyelenggara pemilihan umum ;

19. pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat bidang hubungan antar lembaga/organisasi kemasyarakatan, legislatif, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga penyelenggara pemilihan umum ;
20. peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang hubungan antar lembaga/organisasi kemasyarakatan, legislatif, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga penyelenggara pemilihan umum;
21. koordinasi penegakan Hak Azasi Manusia skala kota;
22. penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan mitigasi/pencegahan bencana skala kota ;
23. penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan bencana skala kota ;
24. penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan pasca bencana skala kota ;
25. penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi kelembagaan penanganan bencana skala kota ;
26. penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan kebakaran skala kota;

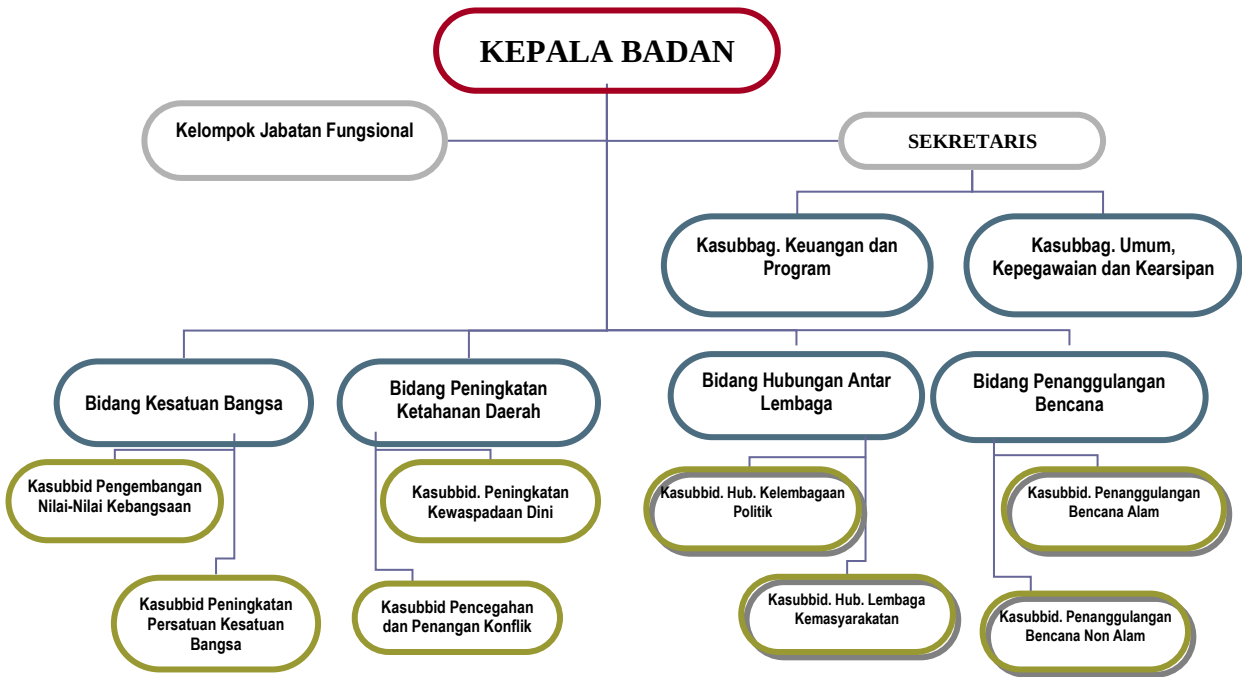
Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas :

- a. Kepala Badan ;
- b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi:
 1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Kearsipan;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Program.
- c. Bidang Kesatuan Bangsa, membawahi :
 1. Sub Bidang Pengembangan Nilai – Nilai Kebangsaan;
 2. Sub Bidang Peningkatan Persatuan Kesatuan Bangsa.
- d. Bidang Peningkatan Ketahanan Daerah, membawahi :
 1. Sub Bidang Peningkatan Kewaspadaan Daerah;
 2. Sub Bidang Pencegahan dan Penanganan Konflik.

- e. Bidang Peningkatan Hubungan Antar Lembaga, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Hubungan Kelembagaan Politik ;
 - 2. Sub Bidang Hubungan Lembaga Kemasyarakatan.
- f. Bidang Penanggulangan Bencana Daerah, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana Alam;
 - 2. Sub Bidang Penanggulangan Bencana Non Alam.
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan ;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar adalah sebagai berikut:

SUSUNAN ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PBD KOTA BLITAR
 (Peraturan Walikota Blitar Nomor 39 Tahun 2014)



C. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2021 dimaksudkan sebagai salah satu media pertanggungjawaban yang akuntabel mengenai pengukuran capaian kinerja organisasi. LKjIP ini diharapkan dapat menjadi:

1. Umpan balik bagi peningkatan kinerja;
2. Sarana penilaian keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab instansi;
3. Daya dorong (Supporting Unit) bagi OPD lain untuk menyelenggarakan tugas umum dan pembangunan daerah dengan baik dan benar (good governance) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Mendorong tumbuhnya OPD yang akuntabel yang beroperasi secara efisien, efektif, dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
5. Memelihara kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Tujuan pelaporan kinerja:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

D. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang melandasi disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2021, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang RPJPD Kota Blitar Tahun 2005 - 2025 ;
14. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 sebagaimana terakhir diubah melalui Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6

- Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2016 – 2021;
15. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 16. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2021;
 17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2021;
 18. Peraturan Walikota Blitar Nomor 39 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar
 19. Peraturan Walikota Blitar Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Walikota Blitar Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Walikota Blitar Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar.
 20. Peraturan Walikota Blitar Nomor 83 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Blitar;
 21. Peraturan Walikota Blitar Nomor Nomor 90 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2021;
 22. Peraturan Walikota Blitar Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2021.

E. ASPEK-ASPEK STRATEGIS

Terdapat beberapa faktor internal dan faktor eksternal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar. Hal itu bisa dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1.1
SWOT Analisis

Analisis lingkungan internal		No.	Kekuatan (S)	No.	Kelemahan (W)
		1.	Perda Nomor 4 Tahun 2013 jo Perwali Kota Blitar Nomor 39 Tahun 2014	1.	Kompetensi Sumber Daya Aparatur yang belum optimal
		2.	Penyediaan anggaran kegiatan Badan Kesbang, Politik dan PBD Kota Blitar	2.	Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia
		3.	Adanya akses yang baik kepada infra struktur dan supra struktur Politik	3.	Peran Bakesbang, Pol dan PBD secara mendasar belum menyentuh Masyarakat, Sehingga Bakesbang, Pol dan PBD Kota Blitar kurang di kenal Masyarakat
		4.	Adanya koordinasi yang baik di jajaran Bakesbang, Pol dan PBD Kota Blitar dengan Badan / Dinas / Kantor / Bagian terkait.	4.	Job Discirption yang kurang tepat dan kurang jelas yang sering kali overlapping (tumpang tindih) dengan Badan / Dinas / Kantor maupun Bagian
		5.	Tersedianya Sumber Daya Manusia		
		6.	Adanya bentuk jejaring sebagai wadah / koordinasi lintas sektoral		
Analisis lingkungan eksternal		No.	Pendorong (SO)	No.	Status (WO)
1.	Masih adanya kebutuhan masyarakat terhadap peran Pemerintah dalam pemberdayaan infra dan supra	1.	Peningkatan peran dalam pemberdayaan infra dan supra struktur Politik, Wawasan kebangsaan, demokrasi dan HAM	1.	Peningkatan Sosialisasi eksistensi Bakesbang, Pol dan PBD Kota Blitar melalui terobosan – terobosan strategi dengan melibatkan

	struktur politik, wawasan kebangsaan, Demokrasi dan HAM	2.	Peningkatan kerja sama (fasilitasi) dengan Parpol, Ormas, LSM dan Perguruan Tinggi serta organisasi pengevakuan bencana.		partisipasi infra dan supra struktur Politik.
2.	Partisipasi Parpol, Ormas, LSM dan Perguruan Tinggi dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan Demokrasi dan Penanggulangan Bencana			2.	Meningkatkan harmonisasi dan komunikasi sosial politik dengan elemen Masyarakat
				3.	Meningkatkan situasi dan kondisi yang kondusif di Kota Blitar
				4.	Meningkatkan kesadaran hukum dan HAM KotaBlitar
No.	Ancaman (T)	No.	Status Quo (ST)	No.	Penghambat (WT)
1.	Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara Nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi OPD	1.	Melakukan kegiatan yang menyentuh kepentingan masyarakat banyak	1.	Peningkatan kualitas SDM
		2.	Meningkatkan peran dan fungsi sebagai pelayan publik	2.	Meningkatkan kewaspadaan dini dengan menggunakan akses dan koordinasi yang baik dengan infra dan supra struktur Politik dan Penanggulangan Bencana Alam dan Non Alam
2.	Keraguan masyarakat terhadap netralitas seorang PNS	3.	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam angka pendidikan dan pembangunan di Bidang IPOLEKSOSBUD		
3.	Relatif tingginya potensi konflik di masyarakat (Vertikal, Horisontal dan SARA)	4.			
		5.	Melakukan koordinasi dengan infra dan supra struktur Politik untuk mengatasi potensi konflik		
4.	Relatif tingginya potensi Bencana Alam dan non Alam	6.	Melakukan koordinasi dengan infra dan supra struktur Politik untuk mengatasi potensi bencana alam dan non alam		

F. ISU-ISU STRATEGIS

Isu – isu strategis adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi OPD di masa datang, suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin di hadapi ke depan oleh masyarakat, sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran.

Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi lingkungan yang bersifat strategis yakni kondisi, situasi, keadaan peristiwa yang menjadi isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Isu-isu strategis tersebut antara lain:

1. Masih rentannya masyarakat terhadap isu-isu yang berpotensi konflik
2. Organisasi kemasyarakatan dan partai politik di Kota Blitar belum berperan secara maksimal
3. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pengurangan resiko bencana

Dengan mengetahui isu-isu strategis yang dihadapi, diharapkan dapat menganalisis lingkungan internal yang perlu mendapat fokus lebih untuk ditingkatkan, strategi yang relevan untuk meningkatkan, serta pengembangan organisasi yang mengarah pada pencapaian tujuan.

BAB 11

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu. Rencana Strategis merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai perwujudan Visi dan Misi Kepala Daerah. Di dalam Rencana Strategis ini termuat tujuan, sasaran dan program yang mengacu pada visi, misi, tujuan serta sasaran RPJMD Kota Blitar.

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar 2016-2021 telah mempertimbangkan baik tentang kondisi dan potensi serta prospek perkembangan sebagai kekuatan untuk menentukan kunci keberhasilan maupun yang menyangkut hambatan, kendala, dan resiko yang dihadapi sebagai kelemahan dan tantangan yang harus ditanggulangi. Berdasarkan Visi pembangunan Kota Blitar yang ingin diwujudkan pada periode 2016-2021 yang tertuang dalam RPJMD Kota Blitar periode (2016-2021) adalah :

“Masyarakat Kota Blitar Semakin Sejahtera Melalui APBD Pro Rakyat Pada Tahun 2021”

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka disusunlah misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya –upaya yang akan dilaksanakan, dimana Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar berada pada misi kesatu dan kelima, yaitu:

- 1. Meningkatkan Aktualisasi Nilai-nilai Religius dalam Kehidupan Bermasyarakat**
- 2. Meningkatkan Keharmonisan Sosial dengan Semangat Rukun Agawe Santoso**

Mengacu dari dua misi inilah disusun tujuan, sasaran dan indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar yang akan dicapai selama periode perencanaan strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

NO	Tujuan		Sasaran	Indikator Sasaran
	Uraian	Indikator		
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Toleransi Masyarakat dan Kerukunan Antar Umat Beragama	Persentase Penanganan Potensi Kasus SARA	Meningkatnya Komunikasi dan Silaturahmi Antar Umat Beragama	Persentase kejadian SARA yang tertangani
2.	Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang aman, tentram, nyaman	Indeks Demokrasi	Meningkatnya partisipasi masyarakat untuk menciptakan kondisi yang aman dan tentram	Persentase konflik sosial yang tertangani
			Meningkatnya ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana	Persentase Kelurahan Tangguh Bencana
			Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Partai Politik	Persentase Ormas dan Orpol yang terdaftar

Untuk mencapai sasaran diperlukan strategi dan kebijakan yang harus dilakukan:

Tabel 2.2
Strategi dan Kebijakan untuk mencapai sasaran

MISI I : Meningkatkan Aktualisasi Nilai-nilai Religius dalam Kehidupan Bermasyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategis	Kebijakan
Meningkatnya Toleransi Masyarakat dan Kerukunan Antar Umat Beragama	Meningkatnya Komunikasi dan Silaturahmi Antar Umat Beragama	Mengoptimalkan penanganan apabila ada kejadian SARA	Koodinasi aktif dengan Forum Kerukunan Umat Bergama (FKUB)
MISI V : Meningkatkan Keharmonisan Sosial dengan Semangat Rukum Agawe Santoso			
Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang aman, tentram, nyaman	Meningkatnya partisipasi masyarakat untuk menciptakan kondisi yang aman dan tentram	Mengoptimalkan penanganan Konflik social yang terjadi/muncul	Bekerja sama dengan instansi terkait
	Meningkatnya ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana	Pendampingan lebih intensif kepada kelurahan tangguh yang sudah terbentuk	Melibatkan peran relawan, organisasi kebencanaan, PMI, Tagana, MMDMC, dan Pramuka
	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Partai Politik	Optimalisasi penggunaan aplikasi data base	Sosialisasi aplikasi data base

Sedangkan program-program dan kegiatan yang dilaksanakan selama periode RENSTRA adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	
Meningkatnya Toleransi Masyarakat dan Kerukunan Antar Umat Beragama	Meningkatnya Komunikasi dan Silaturahmi Antar Umat Beragama	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
		1	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
		2	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang aman, tentram, nyaman	Meningkatnya partisipasi masyarakat untuk menciptakan kondisi yang aman dan tentram	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
		1	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
		2	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
		1	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
		2	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
	Meningkatnya ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana	Program Penanggulangan Bencana	
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
		1	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
		2	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
		1	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
		1	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	

	Kemasyarakatan dan Partai Politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	
		1	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
		2	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
		1	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan kinerja tujuan, sasaran, dan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah dengan Walikota Blitar sebagaimana terlampir. Perjanjian kinerja didasarkan pada sasaran strategis, indikator dan target yang telah dituangkan dalam rencana kinerja sebagaimana tabel berikut :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KOTA BLITAR**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya komunikasi dan silaturahmi antar umat beragama	Persentase kejadian SARA yang tertangani	100 %
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat untuk menciptakan kondisi yang aman dan tentram	Persentase Konflik Sosial yang Tertangani	100 %
3	Meningkatnya ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana	Persentase Kelurahan Tangguh Bencana	80 %
4	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Partai Politik	Persentase Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Politik Yang Terdaftar	80%

PROGRAM		ANGGARAN
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	622.669.700,00
2	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	1.705.576.600,00
3	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	324.871.300,00
4	Program Penanggulangan Bencana	1.442.978.980,00
5	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	862.184.175,00
6	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	82.475.700,00
TOTAL		5.040.756.455,00

BAB 111 AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA/ SASARAN

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik kepada pihak yang memberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas. Untuk mewujudkan organisasi yang akuntabel perlu dilakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang telah dicapai dengan kinerja yang seharusnya dicapai. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara periodik per tribulan dan per tahun. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Capaian kinerja organisasi merupakan capaian sasaran strategis yang diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi pada indikator kinerja sasaran strategis tersebut. Pada capaian kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan capaian strategis untuk kemudian dapat disusun tindak lanjut yang harus dipenuhi untuk melakukan perbaikan ataupun peningkatan. Untuk perbaikan dan peningkatan kinerja berbasis hasil evaluasi dapat dirumuskan solusi yang perlu dilakukan, analisis atas efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya, dan analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja.

Pengukuran capaian kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan/ sasaran serta pelaksanaan kegiatan dan program yang ditetapkan dalam RENSTRA.

Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

1. Rumus 1 :

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

Persentase tingkat capaian = $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$

2. Rumus 2 :

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut:

Persentase tingkat capaian = $\frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$

Untuk menetapkan analisis pencapaian kinerja, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 beserta petunjuk pelaksanaannya telah menetapkan standart penilaian dengan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

No	Nilai Capaian Kinerja		Pemberian Atribut
	%	Keterangan Prosentase	
1.	85% s.d 100%	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen	Sangat Berhasil
2.	70% s.d < 85%	Tujuh puluh persen sampai dengan kurang dari delapan puluh lima persen	Berhasil
3.	55% s.d < 70%	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh persen	Cukup Berhasil
4.	< 55%	Di bawah lima puluh lima persen	Tidak Berhasil

Pengukuran kinerja berisi tujuan/ sasaran/ Kinerja Utama/ Program/ Kegiatan, indikator kinerja dan pencapaian target masing-masing indikator. Pengukuran kinerja sebagaimana yang telah ditentukan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja dapat dilihat secara rinci sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Pencapaian Kinerja Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
Meningkatnya komunikasi dan silaturahmi antar umat beragama	Persentase kejadian SARA yang tertangani	100 %	100 %	100 %
Meningkatnya partisipasi masyarakat untuk menciptakan kondisi yang aman dan tentram	Persentase Konflik Sosial yang Tertangani	100 %	100 %	100 %
Meningkatnya ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana	Persentase Kelurahan Tangguh Bencana	80 %	100 %	125%
Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Partai Politik	Persentase Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Politik Yang Terdaftar	80 %	88,8 %	111%

1. ANALISIS CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN TARGET DAN REALISASI TAHUN 2021

Sesuai Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2016 - 2021, terdapat 4 (empat) analisis sasaran/ kinerja utama. Berikut adalah analisis capaian kinerja berdasarkan target dan realisasi Tahun 2021:

I. Meningkatnya Komunikasi dan Silaturahmi Antar Umat Beragama.

Indikator kinerja untuk sasaran strategis yang pertama ini adalah Persentase kejadian SARA yang tertangani, capaian indikator kinerja utama dapat diukur dengan formulasi:

$$\begin{aligned}
 \text{Formulasi} &= \frac{\text{Jumlah kejadian SARA yang tertangani}}{\text{Jumlah kejadian SARA}} \times 100 \% \\
 &= \frac{2}{2} \times 100 \% \\
 &= 100 \%
 \end{aligned}$$

Selama tahun 2021 ada 2 (dua) kejadian SARA yaitu permasalahan LDII di Kelurahan Gedog dan Tempat Ibadah di

kelurahan Karangsari tetapi keduanya sudah tertangani, maka realisasi yang dicapai 100% sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 100 %, sehingga capaian kinerjanya 100 % dengan kategori **sangat berhasil**

Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai 23ndicator Persentase kejadian SARA yang tertangani sesuai dengan target, yaitu:

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
2. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
3. Sub Kegiatan:
 - a. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
 - b. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.

Secara garis besar, pelaksanaan Program, kegiatan, dan sub kegiatan ini telah berkontribusi terhadap penanganan kejadian SARA. Namun demikian, upaya peningkatan penanganan kejadian SARA terus dioptimalkan dengan terus melakukan Koodinasi aktif dengan Forum Kerukunan Umat Bergama (FKUB).

II. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Untuk Menciptakan Kondisi Yang Aman dan Tentram

Indikator kinerja untuk sasaran strategis yang kedua ini adalah persentase konflik sosial yang tertangani, capaian indikator kinerja utama dapat diukur dengan:

$$\begin{aligned} \text{Formulasi} &= \frac{\text{Jumlah konflik sosial yang tertangani}}{\text{Jumlah konflik sosial}} \times 100 \% \\ &= \frac{6}{6} \times 100 \% \\ &= 100 \% \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan, realisasi kinerja utama sebesar 100 %, dengan target yang ditetapkan adalah sebesar 100 %. Realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga didapat capaian kinerja utama yang kedua sebesar 100 %, dengan kategori **sangat berhasil**.

Data jumlah konflik 24ndica yang tertangani diperoleh bidang Peningkatan Ketahanan Daerah yang telah menangani kejadian konflik 24ndica. Adapun 6 konflik yang terjadi dan sudah ditangani:

No	Tanggal	Uraian Kejadian	Tindakanlanjut	Keterangan
1	29 Maret 2021	Unjuk rasa LSM GPI bersama beberapa eks tenaga outsorching Banpol	Pemerintah Kota Blitar yang diwakili oleh Pjs. Sekda dan tim menerima perwakilan pengunjuk rasa dan memberikan penyelesaian pada kasus dimaksud	Pengunjuk rasa kurang puas atas penjelasan pihak Pekot Blitar dan melanjutkan unras ke Kantor Kejaksaan negeri Blitar
2	30 June 2021	Unras pedagang stadion blitar bersatu menuntut hak untuk pakai kios stadion kembali	dimediasi DPRD Kota Blitar	tercapai kesepakatan
3	11 August 2021	Aksi penolakan sebagian warga RT.04/10 Kel. Gedog terhadap pembangunan IPAL komunal di wilayah mereka	sudah dilakukan upaya mediasi antar pemangku kebijakan dan warga yang menolak pembangunan IPAL tetapi warga yang tidak terdampak justru tetap bersikukuh menolak	tetap dilanjutkan mediasi lagi
4	25 August 2021	Unjuk rasa dan audiensi terkait pembangunan hotel santika di Kel. Bendogerit	diterima perwakilan sebanyak delapan orang untuk dilakukan audiensi	masih akan melakukan aksi serupa di depan Kantor DPRD Kota Blitar
5	09 December 2021	Unjuk rasa mahasiswa Unisba di Kampus Unisba	Perwakilan Mahasiswa diterima untuk audiensi dan diterima oleh pihak rektorat	Mahasiswa menuntut tranparansi pihak kampus dalam berbagai hal
6	09 December 2021	Unjuk rasa LSM KRPK di depak Kantor Kejaksaan Negeri Blitar	Langsung ditemui oleh kasi inteligen Kejari Blitar dan diberikan penjelasan terkait tuntutan pengunjuk rasa	Masa KRPK menuntut usut korupsi di KONI Kota Blitar dan terpidana pencemaran nama baik segera dieksekusi

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung tercapainya 24ndicator kinerja utama ini secara garis besar sudah dilaksanakan secara optimal guna tercapainya penanganan konflik 24ndica. Namun demikian tetap perlu bekerjasama dengan instansi terkait.

III. Meningkatnya Ketangguhan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana

Kelurahan Tangguh Bencana adalah kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan, jika terkena bencana. Adapun syarat-syarat menjadi kelurahan tangguh bencana adalah memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana. Kemampuan ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pasca keadaan darurat.

Indikator kinerja untuk sasaran strategis yang ketiga ini adalah persentase kelurahan tangguh bencana, capaian indikator kinerja utama dapat diukur dengan:

$$\begin{aligned}\text{Formulasi} &= \frac{\text{Jumlah kelurahan tangguh bencana}}{\text{Jumlah kelurahan}} \times 100 \% \\ &= \frac{21}{21} \times 100 \% \\ &= 100\%\end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan, diperoleh realisasi kinerja utama 100%, dengan target yang ditetapkan adalah sebesar 80%. Nilai realisasi ini menunjukkan capaian kinerja utama sebesar 125% dengan kategori **sangat berhasil**, hal ini disebabkan dari 21 kelurahan yang ada di Kota Blitar pada tahun 2021 sudah tuntas terbentuk Kelurahan Tangguh Bencana.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang mendukung tercapainya 25ndicator kinerja utama ini secara garis besar sudah dilaksanakan secara optimal guna terbentuknya 21 kelurahan tangguh bencana pada tahun 2021.

IV. Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Partai Politik

Indikator kinerja untuk sasaran strategis yang keempat ini adalah persentase ormas dan orpol yang terdaftar, capaian indikator kinerja utama dapat diukur dengan:

Formulasi = $\frac{\text{Jumlah orkemas yang terdaftar}}{\text{Jumlah orkemas}} \times 100\%$

$= \frac{183}{206} \times 100\%$

$= 88,8 \%$

Dari hasil perhitungan, diperoleh realisasi kinerja utama sebesar 88,8 %, dengan target yang ditetapkan adalah sebesar 80 %. Tingginya realisasi 26ndicator26 target yang telah ditetapkan menyebabkan capaian kinerja utama mencapai 111% dengan kategori **sangat berhasil**.

Pada tahun 2021 jumlah ormas dan orpol ada 206 terdiri dari 185 ormas, yang terdaftar 162; sedangkan untuk parpol pada tahun 2021 ada penambahan 5 sehingga menjadi 21 Parpol terdaftar.

Program dan kegiatan yang mendukung tercapainya 26ndicator kinerja utama ini secara garis besar sudah dilaksanakan secara optimal, dari data jumlah ormas orpol yang ada dikota Blitar sebanyak 206 yang sudah terdaftar masih 183 dan sisanya dengan tanda warna pada table adalah yang belum terdaftar. Berikut adalah daftar ormas dan orpol:

DAFTAR ORGANISASI KEMASYARAKATAN KOTA BLITAR

NO	ORMAS/ LSM/ YAYASAN	NAMA ORGANISASI	SURAT KETERANGAN TERDAFTAR	SUSUNAN PENGURUS			ALAMAT	
				KETUA	SEKRETARIS	BENDAHARA	ALAMAT 1	KECAMATAN
1	ORMAS	Wanita Khatolik Republik Indonesia (WKRI) Cabang Blitar	Terdaftar	Maria Theresia I.A.	MI Widjayanti Retno W	MI Renny Irawani	Jl. Diponegoro No. 42 Blitar	SANANWETAN
2	ORMAS	Persatuan Wanita RI (PERWARI)	Terdaftar	Sri Hidayati	Lilik Setyawati	Hj. Kundari I.S	Jl. Slamet Riyadi No. 10 Blitar TELP. 0342.802529	KEPANJENKIDUL
3	LSM	The Post Institute	Terdaftar	Mawan Mahyudin	Muslikah	Ben Desi Arisandi	Jl. Muradi 01 TELP. 0342.814484	SANANWETAN

4	ORMAS	PC. Majelis Agama Budha Theravada Indonesia (MAGABUDHI)	Terdaftar	Sugianto Gandhika	Drs. Budiono	Wandoyo	Jl. Slamet Riyadi No. 21 Blitar Telp. 0342.802616	KEPANJENKIDUL
5	ORMAS	PC. Nadhlatul ulama (NU)	Terdaftar	H.DAIMAN AZIS, BA	Drs. ZAENURI	HA.SOEPANG AT, BA	Jl. Cisadane Blitar	KEPANJENKIDUL
6	YAYASAN	Yayasan Iman Blitar	Terdaftar	Drs. RA. SUDARWA DJI	SUPRAPTI, BRE.	Drs. WIRORENO	Jl. Sudarmo No. 1 Blitar Telp. 0342.801775	SANANWETAN
7	ORMAS	Muslimat NU Cabang Blitar	Terdaftar	Hj. Umi Salamah	Tatik Kusumawati	Hj. Zaenab	Jl. Masjid No. 24 Blitar Telp. 0342.801120	KEPANJENKIDUL
8	ORMAS	PEPABRI Cabang Kota Blitar	Terdaftar	H. Bari Subariyanto	Subagio		Jl. Kombes Pol Duryat No 8 Blitar Telp. 0342.801642	SANANWETAN
9	ORMAS	Piveri Kab / Kota Blitar	Terdaftar	SYAMSIAH SURATMAN	SUKARTATI K	MARIJAM SOEPARNO	Jl. Tanjung no. 1 Blitar Telp. 805002 / 807489 / 802283	SUKOREJO
10	ORMAS	DPC LVRI Blitar	Terdaftar	SOERATMAN	SOENTORO	A.H NOERBUANA	Jl. Tanjung 1 Blitar Telp. 0342.805002	SUKOREJO
11	ORMAS	Persatuan Purnawirawan Polri (PP POLRI)	Terdaftar	KAMALI	SOEGIJANTO	NY.SUPRIHATIN S.	Jl. Legundi No. 418 Blitar Telp. 0342.808864	SANANWETAN
12	ORMAS	PERSATUAN ISTRI PURNAWIRAWAN PERIP Blitar	Terdaftar	Heriyanti Sutarji	Bibit Tumirah S.	Sringatin Matsalam	Jl. Kombes Duryat No. 8 Blitar Telp. 0342.801642	SANANWETAN
13	ORMAS	Dewan Harian Cabang Angkatan (DHC) 45 Blitar	Terdaftar	H. SOERATMAN	ARIS SUYATNO, BA	H.SOEKIMAN	Jl. Tanjung No. 1 Blitar Telp. 0342.805002	SUKOREJO
14	YAYASAN	Panti Asuhan Muhammadiyah Kota Blitar	Terdaftar	H. MOCH MUNIR	LISANA NURWIDYA SARI	H. MOCH SUHADI	Jl. Ir. Soekarno 44 Blitar Telp. 0342.802516/811263	KEPANJENKIDUL
15	YAYASAN	Yayasan PGRI	Terdaftar	Heri Sukamto, Spd	ACHMAD SHLEH		Jl. Kalimantan 49 Blitar Telp. 0342.808765	SANANWETAN
16	ORMAS	Peguruan Ilmu Seni Beladiri Pencak Silat Tenaga Dalam “Basmalah”	Terdaftar	HM. SUNARYO	M. IRWANSYAH	ARIS SOBIK DIYANTO	Jl. Aryo Blitar Rt.3/II Blitar Telp. 0342.804230	SUKOREJO
17	YAYASAN	Yayasan Lembaga Mitra Usaha Masyarakat (LIMMAS)	Terdaftar	MOCH. MUHDI	SUBIANTORO, BSc.	HENDRA CAHYA	Jl. Suren 35 Blitar Telp. 0342.7766876	SANANWETAN
18	ORMAS	FERMATA	Terdaftar				Jl. Ir. Soekarno No. 93 Kota Blitar Telp. 0822 3409 9927	KEPANJENKIDUL
19	ORMAS	FKPPI	Terdaftar	Bayu Setyo Kuncoro			Jl. Tanjung No. 3 Blitar	SUKOREJO
20	ORMAS	Purna Paskibraka Indonesia Kota Blitar	Terdaftar	Haryo Aditya	Djatismika	Einggrit	Jl. Ciliwung No. 28 Blitar Telp. 0342.7806953	KEPANJENKIDUL
21	ORMAS	Asosiasi Petugas Rekrut Tenaga Kerja Indonesia Kota Blitar (ASPERTI)	Terdaftar				Jl. Seruni No. 15 Kota Blitar	KEPANJENKIDUL
22	YAYASAN	Yayasan Rukun Ginawa Sentosa (YARGIS)	Terdaftar	Syaiful Bahri	Yakup Sutrisno	Hartoyo	Jl. Kalasan No. 108 RT 5/7 Blitar Telp. 087759312595	SANANWETAN
23	YAYASAN	Yayasan Permata Bintang	Terdaftar	ANAS RITA UDIN	DEWI NATALIA	JUMI MARISAN DEWI	Jl. Borobudur no. 4 Blitar Telp. 085746646963	SANANWETAN

24	LSM	Indonesia Tumpas Korupsi (INTI)	Terdaftar	Ludiono Oktariawan	Dwiky Pradipta	Maria Nunung Indriati	Jl. Cut Nyak Dien 11 Sentul	KEPANJENKIDUL
25	YAYASAN	Yayasan Paraphisikologi Semesta	Terdaftar	TEDDY KLENIK	BAMBANG		Perumnas Pakunden F.12 Blitar Telp. 085707997757	SUKOREJO
26	YAYASAN	Yayasan Persatuan Perguruan Taman Siswa	Terdaftar	KI Drs. AGUS SUSILO	Dra. T.P. ANDAYANI		Jl. A.Yani 46 Blitar Telp. 0342. 802254	SANANWETAN
27	ORMAS	Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kota Blitar	Terdaftar	AKHMAD KHOIRUDIN	MUH ROMDONI	IQBAL FATAWI	Jl. Nias : 93 Sananwetan Blitar Telp. 085755588801	SANANWETAN
28	ORMAS	DPC PROJO (PRO JOKOWI)	Terdaftar	FERRY YUSWANT O	IWAN NAWANJAY A	Hj. ESTI PRATIWI	Jl. TGP NO 1 BLITAR	KEPANJENKIDUL
29	LSM	Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)	Terdaftar	PARDI			Jl. Imam Bonjol No. 14 Blitar	SANANWETAN
30	LSM	Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Ky. R. M Kasiman	Terdaftar	Nurwandit o A	Arinatus S	Rahayu Sri Utami	Jl. Masjid Nomor : 15 – Blitar Telp. 0342-801713	KEPANJENKIDUL
31	YAYASAN	Yayasan KY. R. Moh. Kasiman Blitar	Terdaftar	Drh. MAS TRANGGO NO	Drs. H. NAWADJI ROMLI	RAHAYU SRI UTAMI	Jl. Masjid No. 15 Blitar	KEPANJENKIDUL
32	ORMAS	Persatuan Tuna Netra Indonesia (PERTUNI)	Terdaftar	SUNARYO	TAPE ASTAWA		Perum GKR Blok D 3 Blitar Telp. 0342.810598	SANANWETAN
33	YAYASAN	Yayasan Harmoni	Terdaftar	Pdt Max Prayogiant o	Ev Nolha Malke Rumondor	Tabita Megah Irawati	Jl. Cemara Selatan No. 66 Blitar	SUKOREJO
34	ORMAS	Ikatan Dai Indonesia (IKADI)	Terdaftar	Dr. AZHAR ANWAR	TAUFIQ R.HAKIM	MOCH. SUMITRO	Jl. Enggano Kel.Sananwetan	SANANWETAN
35	YAYASAN	Yayasan Monumen Syuhada' Haji	Terdaftar	H. Zaenal Effendi	Siti Mu'awanah	Annatul Munichah	Jl. Lekso No. 5 Blitar	SUKOREJO
36	ORMAS	Ikatan Pengemudi Transportasi Umum Indonesia (IPTUINDO)	Terdaftar	SUPRIYON O	SUROSO	ROYTRianto	Jl. Melati 73 Blitar	KEPANJENKIDUL
37	ORMAS	PD Senkom Mitra Polri Lokal Jatim 07 Blitar	Terdaftar	H. HERI CAHYONO	MUHAJRIN	H. SUPRIYANTO	Jl. IR SOEKARNO 200	SANANWETAN
38	LSM	FORMAK	Terdaftar	TRI SASONGKO	SUSILO	BASOIR DANUKERTO	Jl. Kerantil Gang V No. 6 Blitar	SUKOREJO
39	ORMAS	FATAYAT NU KOTA BLITAR	Terdaftar	SRIATIN	SITI MAHMUDAH	SUMIARI	Jl. MASJID 24	KEPANJENKIDUL
40	ORMAS	Ikatan Bidan Indonesia	Terdaftar	DWI SAKTI NURHAYATI	SRI ASBUDIARTI	SRI HANDAYANI	Jl. SUDANCO SUPRIADI NO 61 BLITAR Telp. (0342) 802162	SANANWETAN
41	ORMAS	KOTA BLITAR DEVELOPMENT COMMITTEE (BLITAR-DEC)	Terdaftar	NURUL HIDAYAH	NUR ROZIK	NURHUDA	Jl. Ternate RT002 RW 004 Kel. Klampok	SANANWETAN
42	ORMAS	KOMUNITAS SEPEDA TUA INDONESIA (KOSTI)	Terdaftar	0	0	0	Jl. TURI SELATAN NO. 3 KOTA BLITAR	SUKOREJO
43	YAYASAN	YAYASAN OMAH SURGA	Terdaftar	0	0	0	Jl. KELUD NO. 28 KOTA BLITAR	KEPANJENKIDUL
44	ORMAS	DPC GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) Blitar	Terdaftar	a. Ket : Imam Buchori	b. Sek :	c. Ben :	Jl. Riau No. 42 Kota Blitar	SANANWETAN
45	LSM	LSM Jaring Investigasi	Terdaftar	a. Ket. Ir. Joko Trisno Mudiyanto	b. Sek.Tri Sumardianto	c. Ben.Muh ammad Agus Rosidi	Jl. Toba F-26 Blitar Perum Pakunden	SUKOREJO

		Kejahatan Aparat (LSM Jihat)					Permai 081 334 499 867	
46	ORMAS	IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA (IPNU)	Terdaftar	ISOMUDIN ZUHRI	ACHMAD BAIHAQI	WATER TRI LAKSONO	JL. CISADANE Kel.Bendo Blitar 085746540188	KEPANJENKIDUL
47	ORMAS	NASYIATUL 'AISYIYAH	Terdaftar	SEFTI ANA W.	YUNI MASRURI	NUNIK PURNAWIART I	JL. COKROAMINO TO NO.3	KEPANJENKIDUL
48	LSM	GERBANG TOBAT	Terdaftar	H. EDI PURWOKO	ANWAR NURIS	YESY PURWITOSARI	JL. CANDI SURAWANA NO.29	KEPANJENKIDUL
49	ORMAS	PERKUMPULAN FAMILY BIRD CAMONDAN KOTA BLITAR	Terdaftar	MOH. HADI POERNOM O	MOH. ROBY LUTHFIANT A	ABDUL MUNTHOLIB	JL. LAWU NO.29 B KOTA BLITAR	KEPANJENKIDUL
50	ORMAS	HIMPUNAN INSAN PECINTA BUNG KARNO (HIP-BK)	Terdaftar	TAN NGI HING	SUNARI	IDA ARIYATI	JL. BENGAWAN SOLO NO.7 KOTA BLITAR	KEPANJENKIDUL
51	LSM	LEMBAGA MANAJEMEN INFAQ (LMI)	Terdaftar	SOFIA DEWI	THORIQ BOMA	DODY ARIEF	JL. CEMARA SELATAN 68 KOTA BLITAR	SANANWETAN
52	LSM	PURBOKAYUN II	Terdaftar	ANWAR NURIS	DEDDY YANU	ANDIKA YUSUF	JL. KALASAN 61 KOTA BLITAR	SANANWETAN
53	ORMAS	Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI) Cab. Blitar	Terdaftar	Dr. Azhar AnwaR	H. ArdhiSyams yarifin	Agus Susanto	Jln Cemara No.249 Blitar	SUKOREJO
54	LSM	LEMBAGA KEMANUSIAAN NASIONAL KOTAK AMAL INDONESIA	Terdaftar	WARSITO	SISWATUN	SISWATUN	JL. CIPEMALI GG. X NO.18 KOTA BLITAR 085730691155	SANANWETAN
55	YAYASAN	YAYASAN AL MUALLIMIN AL BLITARI CABANG KOTA BLITAR	Terdaftar	MASHUDA	RINA AGUSTINA	ARI HIDAYATI	JL. KALI LEKSO RT.02 RW.01 PAKUNDEN 081554238847	SUKOREJO
56	ORMAS	PIMPINAN DAERAH PEMUDA MUHAMMADIYAH KOTA BLITAR	Terdaftar				JL. Ir. SOEKARNO NO. 13 KOTA BLITAR	KEPANJENKIDUL
57	ORMAS	RAPI Blitar	Terdaftar	a. Ket. : Drs. Tri Iman P, M.Si	b. Sek.: Eko Nuv Riyanto	c. Ben : Agus Subagyo	Jl. Kelud kopl. Stadion Supriyadi Blitar	KEPANJENKIDUL
58	YAYASAN	Yayasan Gerontologi Abiyoso Blitar	Terdaftar	Drs. H. Soeryono	Masdoeki	Drs. H. Is Soegianto	Jl. Musi No.5 Blitar	KEPANJENKIDUL
59	ORMAS	Persatuan Wredatama RI (PWRI)	Terdaftar	Drh. MASTRANG GONO	SOEWANDH IE	SUKARNI SUPADI	Jl. Anjasmoro No. 83 Blitar	KEPANJENKIDUL
60	ORMAS	Senam Tera Indonesia (STI) Cabang Kota Blitar	Terdaftar	a. Ket : JH Karsum	b. Sri Andfarwati	c. Hj.NY Nugroho	Jl. Cipemali : 60 Tanggung – Blitar	KEPANJENKIDUL
61	ORMAS	Perkumpulan Fajar Jaya Dharma Sosial Blitar	Terdaftar	a. Ket : Sintawati	c. Sek : Bambang Setiawan	d. Ben : Megah Irawati	Jl. Ir. Soekarno 345 Sentul Blitar	KEPANJENKIDUL
62	LSM	Gerakan Pemuda Nusantara (GPN)	Terdaftar	a. Ket : Fajrul Fathin	b. Sek :Prayitno	c. Ben : Nurmuidatul Rhmah	Jl. Maninjau D 5 Nomor : 8 RT 01/06 Tanjungsari Blitar	SUKOREJO
63	LSM	Lembaga Solidaritas Putra Putri Bangsa (LSPPB)	Terdaftar	a. Ket : Ummu Chairu W, SE	b. Sek : Fitrotun Nisa, A.Md	c. Ben : Heyang Sekti Firmalena	Jl. Ir Soekarno Nomor : 32	KEPANJENKIDUL
64	ORMAS	Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI)	Terdaftar	a. Ket : Ernawati, S.Pd	b. Sek : Masdarul Khoiri, S.Pd	c. Ben : Marliana Supratiwi R, S.Pd	Jl. Perum Puri Kenari Asri Blok J-2 Karangtengah Kota Blitar	SANANWETAN
65	YAYASAN	Yayasan Al Ghifari	Terdaftar	a. Ket : Nurhadi	b. Sek : Taufiq R Hakim	c. Ben : Sofie Dewi	Jl. Sumba Nomor : 38 – Blitar	SANANWETAN

66	ORMAS	Gabungan Olahraga Wanita (GOW)	Terdaftar	a. Ket : Hj. Purnawan Buchori	b. Sek : Yani Heryanti A	c. Ben :Ny. Hadi Maskun	Jl S. Supriyadi Nomor : 18 – Blitar	SANANWETAN
67	ORMAS	Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (FKBM)	Terdaftar	a. Ket : Mustofa, S.Pd	b. Sek : Sri Haryawati, S.Pd	c. Ben : Sunaryo, SE	Jl. Ciliwung Nomor : 304 – Blitar	KEPANJENKIDUL
68	ORMAS	Persatuan Wanita Olah Raga Seluruh Indonesia (PERWOSI)	Terdaftar	a. Ket : Yuli Samanhudi	b. Sek : Ny. Hadi Maskun	c. Ben : Sri Suwartiingrum	Jl. S. Supriyadi Nomor : 22 Blitar	SANANWETAN
69	ORMAS	Himpunan Paudi kota Blitar	Terdaftar	a. Ket : Sri Winarsih, S.Pd	b. Sek : Dona Kusuma, S.Sos	c. Ben : TC Prasetyarini	Jl. S. Supriyadi Nomor : 18 Blitar	SANANWETAN
70	ORMAS	Gab. Organisasi Penyelenggara TK Indonesia (GOPTKI) Kota Blitar	Terdaftar	a. Ket : Erny Hasnil Purwanto	b. Sek : Wiwin Suharsono	c. Ben : Lasiyem Sulas Asih	Jl. S. Supriyadi Nomor : 22 Blitar	
71	LSM	Lembaga Pengawas Independen Indonesia (LPII) Cabang Kota Blitar	Terdaftar	a. Ket : Suwadi	b. Sek : Nining Setyowati	c. Ben : Daerobi	Jl. Kelengkeng 51 Karangsari – Blitar	SUKOREJO
72	ORMAS	Generasi Muda “ KOSGORO ” Cabang Kota Blitar	Terdaftar	Drs.Moryani,SH	Dra.T.P.Andayani	A.Hmoerdani, MSc	Jl. Untung Suropati No. 1 Blitar	KEPANJENKIDUL
73	ORMAS	Dewan Kesenian Kota Blitar (DKKB)	Terdaftar	Susanto,W S	Djoko Harijanto	Wiwik Triasih	Jl.Ir. Soekarno Blitar	KEPANJENKIDUL
74	ORMAS	Ikatan Remaja Muhammadiyah (IRM)	Terdaftar	Mustakim	W.Bajuri Nurul	Aini	Jl. Cokroaminoto No. 03-05 Blitar	KEPANJENKIDUL
75	ORMAS	Majelis Pelestari Ajaran Bung Karno (MPA-BK)	Terdaftar	H.Tabi Hutomo	Drs.Sujarwo	Bambang Gunawan	Jl. Dewa Ruci D-14 BTN Wisma Indah Blitar .	KEPANJENKIDUL
76	ORMAS	Kesatuan Organisasi Serba Guna Gotong Royong (KOSGORO)	Terdaftar	Ir.Budi Santoso	Dukut Milyono	Wiwoho	Jl. Gatut Koco Blok. G No. 9-10 Blitar	KEPANJENKIDUL
77	LSM	Gerakan Pemuda Ansor (GP-ANSHOR) Kota Blitar	Terdaftar	Didin Mashudi,B A	Rully Mardiyanto	M.Muchtar	Jl. Masjid No. 22 Blitar	KEPANJENKIDUL
78	ORMAS	Perserikatan Aisyiyah Kota Blitar	Terdaftar	H.Heny Zahrohani	H.Chomsatun		Jl. Cokroaminoto No. 3 Blitar	KEPANJENKIDUL
79	ORMAS	DPD “ HIDAYATULLAH ” Cabang Blitar	Terdaftar	Zaenudin Khoiri	Muhammad Muslim	Muhammad Riyadi,S.Pd.I	Jl. Veteran No. 34 Blitar	SANANWETAN
80	LSM	Paguyuban Korban Orde Baru (PAKORBA)	Belum Terdaftar	Warodi			Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 21 Blitar.	SANANWETAN
81	ORMAS	Gerakan Nasional Anti Narkotika (GRANAT)	Terdaftar	I Made Biasa SM.IKA	M.Hanafi	M.Agus Slamet,SE	Jl. Cokroaminoto Gang Masjid Blitar	KEPANJENKIDUL
82	ORMAS	Bhayangkari Cabang Blitar	Terdaftar	Ny.Gatot Subiantoro			Jl. Sudirman No. 32 Blitar	KEPANJENKIDUL
83	ORMAS	Perserikatan Muhammadiyah Cabang Kota Blitar	Terdaftar	H. M. CHAFIF	Drs. H. MASRUCHIN		Jl. AKS TUBUN No. 3 Blitar	SANANWETAN
84	ORMAS	Perserikatan Muhammadiyah Kec. Kep.kidul Kota Blitar	Terdaftar	ABDUL HAMID	ACHMAD MAMIK CH.		Jl. Kelud No. 70. B Blitar	KEPANJENKIDUL
85	ORMAS	Dharma Pertiwi Cabang Blitar	Terdaftar	ARIES SUHARDON O	Ny. SUGYONO		Jl. A. Yani No. 6 Blitar	SANANWETAN
86	ORMAS	Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Blitar	Terdaftar	Ny.HJ. SUYANTO.S E.MM	HJ.SRI SUHARTIS		Jl. Sudanco Supriyadi No. 18 Blitar	SANANWETAN
87	ORMAS	Persekutuan Do’a Ekklesia Blitar	Terdaftar	Bambang Indra Misianto	HenokHerman Widodo		Perumnas Pakunden Blitar	SUKOREJO

88	ORMAS	Paguyuban Kaweruh Mursitomo Waskito Tunggal	Terdaftar	a. Ket. : TRIM RIONO	b. Sek. : SISWANTO	c. Ben. :	Jl. Widuri No. 325 Blitar	SUKOREJO
89	ORMAS	Perkumpulan Keluarga Besar “ Tunggul Wulung “	Terdaftar	a. Ket. : NINUS SUDARWATI	b. Sek. : RITA LEO MEDY.P	c. Ben. :	Jl. Musi No. 05 Blitar	KEPANJENKIDUL
90	ORMAS	Persatuan Warga Theosofi Indonesia (PERWATHIN)	Terdaftar	a. Ket. : UNTUNG RAHARDJO	b. Sek. : NY. HARDJITOE	c. Bend.:	Jl. RA. Kartini 28 Blitar	KEPANJENKIDUL
91	ORMAS	Perguruan Senam Tenaga Dalam Bhirawa Seta	Terdaftar	a. Ket. : R. HENDRO MS.	b. Sek. : DIDIT SUGIANTO	c. Bend.:	Jl. Slamet Riyadi 80 Blitar	KEPANJENKIDUL
92	ORMAS	Persatuan Dokter Gigi Indonesia	Terdaftar	a. Ket.: Drg. HM. SUDARMA DJI	b. Sek.: Drg.DWI RAHAYU	c. Bend.:	Jl. Jagung Suprpto 15 Blitar	KEPANJENKIDUL
93	ORMAS	DPC. Gapensi	Belum Terdaftar	a. Ket. : JODIONO	b. Sek. :	c. Ben.:	Jl. Ngegong Gedog Blitar	SANANWETAN
94	ORMAS	Forum Komunikasi Interaksi Sosial	Belum Terdaftar	a. Ket. : Drs. HARNOWO EKO	b. Sek. : AGUS HADI	c. Ben.:	Jl. Nias No. 75 Blitar	SANANWETAN
95	ORMAS	Becak Wisata Makam Bung Karno	Terdaftar	a. Ket. : MARYONO	b. Sek. :SULIS	c. Ben. :	Jl. Dr. Cipto No. 3 (PIPP) Blitar	KEPANJENKIDUL
96	ORMAS	Himpunan Pedagang di Makam Bung Karno (HIPEMAB)	Terdaftar	a. Ket. : SUTARTO HADI	b. Sek. :YUDI	c. Ben. :	Jl. Dr. Cipto No. 3 Blitar (PIPP)	KEPANJENKIDUL
97	LSM	Persatuan Reformasi Indonesia Insan Bersaudara	Belum Terdaftar	a. Ket. : BU TRUKISAH	b. Sek. :	c. Ben. :	Gaprang Maunen No. 4 Rt.4/I	SANANWETAN
98	ORMAS	Forum Komunikasi Kota Blitar	Terdaftar	a. Ket. :Drs. HARNOMO EKO	b. Sek. :	c. Ben. :	Jl. Nias No. 75 Blitar	SANANWETAN
99	LSM	LPPM dan UKM	Terdaftar	a. Ket. : M. HANAFI	b. Sek. : Ir. HERRY.S	c. Ben. :	Jl. Kalimantan 34 Blitar	SANANWETAN
100	LSM	Badan Musyawarah (BAMUS) Blitar	Terdaftar	a. Ket. : SUKARDI, Spi.	b. Sek. : M.MUZAMI L. S.Ag.	c. Ben. :	Jl. Dieng Gg. II No. 35	KEPANJENKIDUL
101	YAYASAN	Yayasan Kathalisma 75	Belum Terdaftar	a. Ket. : DJOKO SUDIBYO	b. Sek. : MUCHSIN	c. Bend:	Jl. Hasanudin 6 Blitar	SANANWETAN
102	YAYASAN	Yayasan Sunangiri	Terdaftar	a. Ket. : SUBAKIR	b. Sek. : AGUS SALIM. MS	c. Bend	Jl. Tidar 16 – 17 Blitar	KEPANJENKIDUL
103	YAYASAN	Yayasan Pembangunan Kesejahteraan Islam	Belum Terdaftar	a. Ket. : Drs. FARIED AKHMADI	b. Sek. : SUMARLAN	c. Bend:	Jl. Lekso 12 Blitar	SUKOREJO
104	YAYASAN	Yayasan Pendidikan Kebudayaan Nasional (YAPENAS)	Terdaftar	a. Ket. : M. HANAFI	b. Sek. : DIANA ERAWATI, SH.	c. Bend:	Jl. Tengger No. 36 Blitar	KEPANJENKIDUL
105	YAYASAN	Yayasan Pendidikan SMP Sore 2 Blitar	Belum Terdaftar	a. Ket. : Hj. NAFISATUN	b. Sek. : SOEHARMI	c. Bend:	Jl. Sultan Agung No. 36 C Blitar	SANANWETAN
106	YAYASAN	Yayasan Taman Kanak-Kanak Pertiwi	Terdaftar	a. Ket. : Ny. ERNA ANANG T.	b. Sek. : Ny. JOENARSO	c. Bend:	Jl. Diponegoro No. 23 Blitar	SANANWETAN
107	YAYASAN	Yayasan Al-Istiqlal	Terdaftar	a. Ket. : ZAINUDIN KHOIRI	b. Sek. : MUHAMMAD MUSLIM	c. Bend:	Jl. Ir. Soekarno No. 88 Blitar	KEPANJENKIDUL
108	YAYASAN	Yayasan Pendidikan Luar Biasa	Terdaftar	a. Ket. : Drs. SUGIARTO	b. Sek. : Dra. CHASANAH	c. Bend:	Jl. TGP. No. 28 Blitar	KEPANJENKIDUL
109	YAYASAN	Yayasan Yohanes Gabriel Wijana Sejati	Terdaftar	a. Ket. : RM. A. PRATISTO. PR	b. Sek. : AGUS SURATNO	c. Bend:	Jl. Diponegoro No. 44 Blitar	SANANWETAN

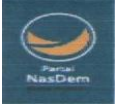
110	YAYASAN	Yayasan Kalimasada (Kajian Penelitian Masyarakat Antar Daerah)	Terdaftar	a. Ket. : TUTUT GIRIANTO	b. Sek. : OYIK. RH	c. Bend:	Jl. Kaca Piring 71 Blitar	KEPANJENKIDUL
111	YAYASAN	Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Blitar (YIKI)	Terdaftar	a. Ket. : M. HANAFI, SH	b. Sek. : DODIK . S. WAHYUDI	c. Bend:	Jl. Kenari II/9 Blitar	SANANWETAN
112	YAYASAN	Lembaga Pengembangan Sosial Dan Lingkungan Hidup / Yayasan Nasional Blitar	Belum Terdaftar	a. Ket. : Ir. SUNARSO	b. Sek. : M. HANAFI	c. Bend:	Perumnas Pakunden Blok D / 10 Blitar	SUKOREJO
113	YAYASAN	Yayasan Mandiri	Terdaftar	a. Ket. : M.AGUS SLAMET, SE	b. Sek. : SUGENG YULIANTO	c. Bend:	Perumnas Pakunden Blok E1/24 Blitar	SUKOREJO
114	ORMAS	Pos Ekonomi Rakyat	Terdaftar	a. Ket. : SUPRIARN O	b. Sek. : WAHYOENI NGDYAH	c. Bend:	Jl. Ciliwung V/2	KEPANJENKIDUL
115	ORMAS	Forum Gerakan Pendidikan Nasional (FPGN) Blitar.	Terdaftar	a. Ket. : Drs. MAINI MARGONO	b. Sek. : Drs. TRI AMBULANT O	c. Bend:	Jl. Sultan Agung No. 66	SANANWETAN
116	YAYASAN	Yayasan Nasional	Terdaftar	a. Ket : MUHAMM AD HANAFI	b. Sek. : CHRISNA PERMADI	c. Bend:	Jl. Tengger No. 36	KEPANJENKIDUL
117	YAYASAN	Yayasan Shidiqiyah	Belum Terdaftar	a. Ket. : Drs. M. KUNTARTO	b. Sek. : SAMSURI	c. Bend:	Jl. Turi No.3	SUKOREJO
118	ORMAS	DPC. Pemuda Pancasila	Terdaftar	a. Ket. : MOESGITO KHANCIL	b. Sek. : JHONI. BP.	c. Bend:	Jl. Jati IV/33 & Jl. Kerantil Gg. 6 No. 33	SUKOREJO
119	LSM	LSM Kipas	Belum Terdaftar	a. Ket. : M. ANAS RIJAL, S.HI.	b. Sek. : CHOIRUL ROZIKIN	c. Bend:	Jl. Rayung Wulan 1A Blitar	SUKOREJO
120	LSM	LPM Wacana Nusa	Belum Terdaftar	a. Ket. : Drs. WAHYU HIDAYAT	b. Sek. : TEDY ASPRINO, SE.	c. Bend:	Jl. S. Parman 52 Blitar	SANANWETAN
121	LSM	Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan Dan Pembangunan (LPKP)	Belum Terdaftar	a. Ket. : SUTIAH	b. Sek. : TUNGGUL BANTOLO	c. Bend:	Jl. Beliton 24 Karangtengah Blitar	SANANWETAN
122	ORMAS	Organda Blitar	Terdaftar	a. Ket. : IR. HERI ROMADHO N	b. Sek. : MASDOEKI	c. Bend:	Aks Tubun I/46C Telp. 805374	SANANWETAN
123	YAYASAN	Yayasan Tunas Harapan Bangsa	Terdaftar	a. Ket. : RETNO WIDODO	b. Sek. : WIRATMO SUNIADJI	c. Bend:	Jl. S. Agung 5Blitar	SANANWETAN
124	YAYASAN	Yayasan Djaladri	Terdaftar	a. Ket. : ANDI YUWONO, S.Sos.	b. Sek. : YUSTINA HARINI, SE.	c. Bend:	JL. CIMANDIRI GG BUNTU LING. BADUT KEL TANGGUNG	SANANWETAN
125	YAYASAN	Yayasan Suaka Bangsa	Belum Terdaftar	a. Ket. : GATOT SARWONO	b. Sek. : INDIAR SHODIQ	c. Bend:	Jl. Masjid 63 RT 2/I Kauman Blitar	KEPANJENKIDUL
126	LSM	Lentera Blitar	Terdaftar	a. Ket : Muhamad Ghufron,S. Ag	b. Sek : W. Shomad Fathoni,S.A g	c. Ben.: Drs.Heri Sukotjo	Jl. Asahan Rt.01/Rw.01 Tanjungsari Blitar.	SUKOREJO
127	LSM	Persada II Kota Blitar	Belum Terdaftar	a. Ket.: D. EDY SANYOTO,B .Sc.	b. Sek : SUTRISNO	c. Ben.:MUJ IONO.	Jl. Dieng 26 a	KEPANJENKIDUL
128	ORMAS	Paguyuban Sang Galih Blitar	Belum Terdaftar	a. Ket.:K H.AM.GAT UT HARDJITO	b. Sek : YULI DWIANTO	c. Ben.:SWA RTI	Jl. Cisadane No.25 Kel.Bendo Blitar	KEPANJENKIDUL

129	ORMAS	Salimah Kota Blitar	Terdaftar	a. Ket.: UMUL FADILAH,S. Si. Apt.	b. Sek : ERY MINTARSIH	c. Ben.: TUSTI SRI WAHYUNI	Jl. Barito Selatan No.24 Kel. Kauman	KEPANJENKIDUL
130	LSM	Serikat Buruh Merdeka (SBM) Blitar	Terdaftar	a. Ket.: MAHENDR A SETIA BUDI.	b. Sek : S. CHUSNUL CHOTIMAH	c. Ben.: SUSIATI	Jl. Patimura 128.c Blitar	SANANWETAN
131	ORMAS	Jurnalis Indenpendent Blitar (JIB)	Terdaftar	a. Ket : ARYO PURBOYO	b. Sek : M. IRFAN ANSHORI	c. Ben : KUSNUL HIDAYATI	Jl. Ir. Soekarno 24/B Blitar	KEPANJENKIDUL
132	LSM	Pusat Kajian Kebijakan Pemerintah (P2KP)	Terdaftar	a. Ket : HENDIK BUDI YUANTORO	b. Sek : FITRA RAHAYU ISMIATI	c. Ben : KURNIANTO	Jl. Sumatera No. 14 Blitar	SANANWETAN
133	LSM	LSM Soko Limo	Terdaftar	a. Ket : MUCHSON, SE	b. Sek : MUCHLIS WIBOWO, SE	c. Ben : PRIYAGUNG KUSUMO W	Jl. Ploso No. 12 Blitar	SANANWETAN
134	LSM	LSM Penegak Demokrasi	Terdaftar	a. Ket : Maksum Gozali, K	b. Sek : Amirul Mukminin	c. Ben : Nabat Kholifatul Janah	Jl. Masjid Al Firdaus Ds. Jingglong Kaweron Talun Kab. Blitar	KABUPATEN
135	YAYASAN	Lembaga Yayasan Ponpes Mambaus Syafa'atil Qur'an Ngegong Gedog Kota Blitar	Terdaftar	a. Ket : Nur Cholis	b. Sek : Moch. Sholikin	c. Ben : Abdul Kholik	Jl. Letda Markawi Ngegong Gedog Kota Blitar	SANANWETAN
136	YAYASAN	Yayasan Taman Pendidikan PA "Tarbiyatul Falah " Blitar	Terdaftar	a. Ket : KA. Karim Muhaimin	b. Sek : Khoirul Huda	c. Ben : Dewi Halimah	Jl. Manggar No. 9 Blitar	SUKOREJO
137	YAYASAN	Yayasan Mambaul Hisam Pakunden – Blitar	Terdaftar	a. Ket : H. Ali Mustofa	b. Sek : Afifatul Saadah	c. Ben :H. Sarianto	Jl. Asahan No. 52 Blitar	SUKOREJO
138	YAYASAN	Yayasan Taman Pendidikan Islam (YATPI) Blitar	Terdaftar	a. Ket : Drs. Sjamsuka	b. Sek : Moch. Djazuli	c. Ben : Ashar Panut, S.Pd	Jl. Diponegoro No. 8	SANANWETAN
139	YAYASAN	Yayasan Ponpes Bustanul Muta'allimin Blitar	Terdaftar	a. Ket : Muhtar Lubby S.Ag	b. Sek : Syamsul Guftron	c. Ben : Dewi Robithoh	Jl. Barito No. 2 Blitar	SANANWETAN
140	YAYASAN	Yayasan Al Istiqlal Hidayatullah Blitar	Terdaftar	a. Ket : Taufiq Sholihin	b. Sek : Muh. Muslim	c. Ben : Rido Wahyono, S.Ag	Jl. Srigading No. 52 Blitar	KEPANJENKIDUL
141	YAYASAN	Yayasan Ibadurrohman Blitar	Terdaftar	a. Ket : M. Mansur Shodiq	b. Sek : Moh. Yarul Fathoni, S.Pd	c. Ben : Kusnatin	Jl. Kol Sugiono Gg. Masjid Ngegong ,Gedog, Blitar	SANANWETAN
142	YAYASAN	Yayasan Indonesia Baru	Terdaftar	a. Ket.Pu rwanto, SPd	b. Sek. Yusnia Novayanti	c. Ben. Leili Rokhana	GMI Blok I No. 10 Blitar	KEPANJENKIDUL
143	YAYASAN	Ys Kemanusiaan Jatidiri Bangsa Cab. Blitar	Belum Terdaftar	a. Ket. Mardani	b. Sek.Mo ch.Dardak	Ben.Mukhaya ni	Lk. Santren – Tanggung – Blitar	KEPANJENKIDUL
144	LSM	Forum Komunikasi Anjal (Forkom Anjal) Blitar	Terdaftar	a. Ket. Mohamad Santoso	b. Sek. Didik Oliyantoro	c. Ben.Slam et Kismanto	Jl. Pamungkur – Blitar	SUKOREJO
145	ORMAS	ORARI Lokal Blitar	Terdaftar	a. A.Warj anto	b. Eddy Yunarko	c. Endang Werdiningsih	Jln.Diponegoro : 21 Blitar	SANANWETAN
146	LSM	Lembaga Swadaya Pemuda Mandiri	Terdaftar	a. Ket.Na nang Pramadi	b. Sek.Me go Cahyo Winarbowo	c. Ben.Lely Arini	Jln.Borobudur Nomor : 22 / 28	SANANWETAN
147	LSM	LSM Rethink	Belum Terdaftar	a. Ket ChoirulUm am, S.Pd	b. Sek. Aris Susanto, SP	c. Ben. Desi Arma Susana	Jln.Sudanco Supriyadi No. 201 A	SANANWETAN
148	LSM	Pimpinan Umum Persatuan Korps Pembela Tanah Air (Korps Peta)	Terdaftar	a. Ket. Arifan	b. Sek. Sri Amin	c. Musini	Jln. Sdc. Suparyono No: 27	SANANWETAN
149	ORMAS	Paguyuban Warga Eks Timor Timur	Belum Terdaftar	a. Ket. Siswanto	b. Sek. Fauzun Daroini	c. Bend. -	Jl. Sunan Kalijogo Link.	KABUPATEN

		(Pawartim) Daerah Kab/Kota Blitar					Jajar – Kanigoro Blitar	
150	YAYASAN	Yayasan Klenteng Poo An Kiong	Terdaftar	a. Ket :Dg Thin Soek Liong	b. Sek : Dg. Dr Fenny Kowe	c. Ben : Dg. Tjio Nan San	Jl. Merdeka 194 Blitar	SUKOREJO
151	ORMAS	Paguyuban Pedagang Asongan Mandiri B2K	Belum Terdaftar	a. Ket : Sugembong Wibowo	b. Sek : Dewi Purnomosari	c. Ben : Jumadi	Jln. Kalimas Rt 01/VI Pakunden	SUKOREJO
152	ORMAS	Ikatan Pecinta Sejarah Blitar	Terdaftar	a. Ket : Yon Muyono	b. Sek : Rahadi Priyo Sembodo	c. Ben : Hendra Tristiawan	Jl.Ir. Sukarno Gg.Suparjono 15	KEPANJENKIDUL
153	YAYASAN	Yayasan Patria Mulia (YPM) Blitar	Belum Terdaftar	a. Ket : Fatkhur Rochman	b. Sek : Suryadi Hendratmaka	c. Ben : Somadi	Jln Turi Selatan	SUKOREJO
154	ORMAS	DPC Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI)	Terdaftar	a. Ket : Bambang Sunarso	b. Sek : Sugianto	c. Ben : Subekti	Jl Ikan Gurami : 2 Perum Griya Kalimas Indah Pakunden Blitar	SUKOREJO
155	LSM	Rakyat Tuntut Amanah Keadilan (RATU ADIL)	Terdaftar	a. Moha mmad Triyanto	b. Pringgo Priyanggono	c. Mahendra Setia Budi	Jl Mendut Nomor : 49 Blitar	SANANWETAN
156	LSM	DPD LPPNRI (Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara RI)	Terdaftar	a. Budiono, BSc	b. Ir. Bambang Gunawan	c. Sujito, SH	Jl Tengger No : 11 Blitar	KEPANJENKIDUL
157	LSM	LESKIA (Lembaga Study Kebijakan, Media dan Lingkungan) Blitar	Belum Terdaftar	a. Ket : Herwidi Bastugito, SH	b. Sek. EdySaputra	c. Ben : Sri Haryati	Jl Wr Supratman 31 – C Blitar	SANANWETAN
158	ORMAS	Komunitas Pemerhati Warisan Budaya (BHS) Blitar	Terdaftar	a. Ket : Drh Mas Tranggono	b. Sek : Bambang In Mardiono	c. Ben : Julianto Purnomo	Jl. Musi : 9 Blitar	KEPANJENKIDUL
159	ORMAS	FORWARA (Forum Sukwan Sekolah Negeri)	Terdaftar	a. Ket : Gunawan S.Pd	b. Sek : Hayu Priyanto, S.Pt	c. Ben : Kusbiantoro, A.Md	Jl. Moh. Hatta No. 12 Kota Blitar	KEPANJENKIDUL
160	LSM	DPD Pemuda Panca Marga (PPM)	Terdaftar	a. Ket. Moch. Sidik	b. Sek Joko Nurbatin	c. Ben	Jalan Tanjung Nomor : 1 Blitar	SUKOREJO
161	ORMAS	Paguyuban "Guyub Rukun" Kota Blitar	Terdaftar	a. Ket: Hadi Siswoyo	b. Sek: Susilo	c. Ben: Suyanto	Jl. Kerantil Gang 1 no. 05 Kota Blitar	SUKOREJO
162	ORMAS	Paguyuban Pemerhati Istana Gebang (PPIG) Kota Blitar	Terdaftar	a. Ket: S. Setyawan	b. Sek: Eko Siswantoro	c. Ben: Edy Koesnadi	Jl. Dr. Soetomo No. 15 Kota Blitar	SANANWETAN
163	ORMAS	Paguyuban Forum Blitar Raya (FBR)	Terdaftar	a. Ket : Kadiono	b. Sek : Moch. Farouk	c. Ben : Hari Susilo	Jl. Kalimantan No. 35 Kota Blitar	SANANWETAN
164	YAYASAN	Yayasan H Sabih Goenadjaya dikoesoemah Cabang Blitar	Belum Terdaftar	a. Ket : H. Daiman Azis	b. Sek : Yusuf Jangkung	c. Ben : Ilma Ainur Riza	Jl. Ir. Soekarno 287Sentul Blitar	KEPANJENKIDUL
165	ORMAS	Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten/Kota Blitar	Terdaftar	a. Ket : Lestari	b. Sek : Nyoman K Yasa	c. Ben : Endang Sunarsih, M.Pd	KSU Artha Bhuana Ds Kendalrejo Talun Blitar	KABUPATEN
166	LSM	Lembaga Missi Reclassering repubik Indonesia Badan Hukum & asyarakat (LMR RI-BPH.NMS) Bantuan Hukum Di Luar Negeri & Di Dalam Pengadilan	Belum Terdaftar	a. Ket: Tugas Nanggolo Yudho	b. Sek: Rudi Puryono, SH	c. Ben: Aris Wiratno	Jl. Cemara No : 226 Blitar	SUKOREJO

167	YAYASAN	YAYASAN Perkumpulan Sahabat Perempuan Anak Kota Blitar	Terdaftar				jl. Kawi 88	sukorejo
168	YAYASAN	Yayasan Putra Putri Tunas Bangsa	Terdaftar				Jl. Ir. Soekarno No 341 A	KEPANJENKIDUL
169	YAYASAN	Yayasan Bina Bangsa Nusantara	Terdaftar					SANANWETAN
170	ORMAS	PC. IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA (IPPNU) KOTA BLITAR	Terdaftar				Jl. Cisadane RT 01 RW 03	KEPANJENKIDUL
171	YAYASAN	YAYASAN SURYA NUSWANTARA	Terdaftar					SANANWETAN
172	YAYASAN	BADAN MUSYAWARAH ANTAR GEREJA (BAMAG) KOTA BLITAR	Terdaftar					SUKOREJO
173	LSM	LSM KPK	Terdaftar				PONGGOK	KABUPATEN
174	ORMAS	DPD PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA	Terdaftar	Sri Winarni	Tutus Febri Ajimas Budi	Shultonah	Jl. Dr. Sutomo No. 56 Kota Blitar	SANANWETAN
175	ORMAS	DPC PERSAUDARAAN MITRA TANI NELAYAN INDONESIA	Terdaftar	Triyono	Setyo Wibowo	Anjarwati	Jl. Kedondong 1/38 Kota Blitar	SUKOREJO
176	ORMAS	IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH	Terdaftar	Sukma Uli Nuha	Fazuhratul Hayati	Muchlis Yuli Arista	Jl. Ir. Sukarno No 13 Kota Blitar	KEPANJENKIDUL
177	ORMAS	Perkumpulan lembaga Kursus dan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat	Terdaftar				Jl. Jawa No. 53 Kota Blitar	SANANWETAN
178	ORMAS	Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan	Terdaftar				Jl. E no. 10 Tanjungsari Sukorejo Kota Blitar 085334544550	SUKOREJO
179	ORMAS	Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate Cabang Blitar	Terdaftar	Miskan Hadi Prasetyo, ST	Ismu Nursito, A.Ma	Katiman, S.Pd., M,Pd.	Perum Puri Kenari Asri Blok H-11 Kota Blitar	SANANWETAN
180	ORMAS	Himpunan Putra Putri Keluarga Angkatan Darat (HIPAKAD)	Terdaftar	Soegeng Joenianto, ST	Tugas Nanggolo Yudho	H. Aris Wijaya	Jl. A.Yani RT/RW 01/VI	SANANWETAN
181	ORMAS	DPD KNPI (KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA)	Terdaftar	Jimmy Yanuar	Dhonny	Danielim	Jl. Veteran Kota Blitar	SANANWETAN
182	ORMAS	DPD AMPI (ANGKATAN MUDA PEMBAHARUAN INDONESIA)	Terdaftar	Lanacar Panda Potan sinaga	Ivan Leksana Vemiana	Vemiana	Jl. Kalimantan Kota Blitar	SANANWETAN
183	ORMAS	PATAS	Terdaftar	Punjung Nugroho	Rully	Antok	Jl. Bungur	SUKOREJO
184	ORMAS	PEMUDA BATAK BERSATU PC BLITAR RAYA	Terdaftar	Lanacar Panda Potan sinaga	Pardingotan Sinurat	Yunus Simamora	Jl. Bali 209	SANANWETAN
185	YAYASAN	BOLO CANGKRUK MUBaROK	Terdaftar	Anjar Hernowo	Ratno Subiantoro	Mashuri Gunawan	Jl. Manggar 53	SUKOREJO

DATA PARTAI POLITIK KOTA BLITAR

NO	NAMA PARPOL	PENGURUS	ALAMAT SEKRETARIAT
1	 PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	Ketua : MUCHSON, SE Sekretaris : DWI HARIONO Bendahara : TIMOTHY KURNIAWAN Bendahara : YUNUS	JL. KENARI NO. 48 BLITAR
2	 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Ketua : H. PURNAWAN BUCHORI Sekretaris : TOTOK SUGIARTO Bendahara : Drs. ABDUS SIAKUR	JL. SERAYU NO. 44 BLITAR
3	 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	Ketua : dr. LEO SUDILAKSONO Sekretaris : PUJANTO Bendahara : dr. LAILY KURNIAWATI	PERUMAHAN KENARI JL. KABAINA BLOK A
4	 PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	Ketua : M. SAMANHUDI ANWAR, SH Sekretaris : GLEBOT CATUR ARIANTO Bendahara : SUTANTO, SH	JL. DR. WAHIDIN NO 59 BLITAR
5	 PARTAI GOLONGAN KARYA	Ketua : Drs. Muh. HADI USODO Sekretaris : DJAROT SIDARTA Bendahara : HENI RATNAWATI	JL. KALIMANTAN NO. 81 BLITAR
6	 PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	Ketua : Ir. ENDRO HARMONO, MBA Sekretaris : TAN NGI HING Bendahara : Drs. SLAMET	JL. TIMOR NO. 80 BLITAR
7	 PARTAI DEMOKRAT	Ketua : ITO TUBAGUS ADITYA, SE Sekretaris : RIDHO HANDOKO Bendahara : MUH. BUSTANUL ARIFIN	JL. NIAS BLITAR
8	 PARTAI AMANAT NASIONAL	Ketua : DJOKO NURBATIN Sekretaris : SUJOKO Bendahara : NURMAN MUSLIH	JL. COKROAMINOTO Gg. MASJID
9	 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	Ketua : AGUS ZUNAIDI, SE H. MUH. NUHAN EKO W., Sekretaris : SH Bendahara : ARIF RAHMAN	JL. KALI BRANTAS NO. 76
10	 PARTAI HATI NURANI RAKYAT	Ketua : YOSSY YUKARDI Sekretaris : NUSWANDITO ANANTO Bendahara : SITI SUNDARI	JL. Dr. SUTOMO NO. 3 BLITAR
11	 PARTAI BULAN BINTANG	Ketua : SISWANTO HW, Spd Sekretaris : SUSILO	JL. S SUPRIYADI NO 201 A BLITAR

			Bendahara : JUJONO	
12		PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	Ketua : IRENE DWI A Sekretaris : Bendahara : RIEKA SILVIA	JL. KALI OPAK NO. 5 BLITAR
13		PARTAI BERKARYA	Ketua : HS WIJANTO Sekretaris : FAHMI WIRAJAYA Bendahara : RIZA RACHMADI	Jl. WR SUPRATMAN NO. 4 BLITAR
14		PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)	Ketua : Sekretaris : Bendahara :	JL. KAWI NO. 25
15		PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	Ketua : Sekretaris : Bendahara :	JL. CILIWUNG
16		PARTAI GARUDA	Ketua : Sekretaris : Bendahara :	
17		PARTAI GELORA	Ketua : DWIYONO Sekretaris : AHMAD HUNAIFI Bendahara : IKE YAYANG HARGI S	JL. MUSI NO. 2 BLITAR
18		PARTAI UMMAT	Ketua : RENDY YOYOK P Sekretaris : IRMA OKTA W Bendahara : PULUNG WIJAYA	JL. AMBALAT NO. 14 BLITAR
19		PARTAI RAKYAT ADIL MAKMUR	Ketua : SISWANTO Sekretaris : RISNO NUR CAHYO Bendahara : EKO WAHYUDI	JL. A. YANI NO.54 BLITAR
20		PARTAI ERA MASYARAKAT SEJAHTERA (EMAS)	Ketua : NGATENO Sekretaris : ANDI ALI MUSTOFA Bendahara : PRISTYANINGSIH	PURI KENARI ASRI BLOK O NO. 46 BLITAR
21		PARTAI KEDAULATAN RAKYAT	Ketua : ALI WANOTO Sekretaris : DINI MARETASARI Bendahara : RIBUT ANDAYANI	JL. CILIWUNG NO. 364 BLITAR

2. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020 – 2021

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja
Tahun 2020 dengan Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya komunikasi dan silaturahmi antar umat beragama	Persentase kejadian SARA yang tertangani	100 %	100 %	100 %	100 %
Meningkatnya partisipasi masyarakat untuk menciptakan kondisi yang aman dan tentram	Persentase Konflik Sosial yang Tertangani	100 %	100 %	100 %	100 %
Meningkatnya ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana	Persentase Kelurahan Tangguh Bencana	60%	80,9%	80%	100%
Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Partai Politik	Persentase Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Politik Yang Terdaftar	78%	74,6%	80%	88,8%

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. IKU pertama, jika dibandingkan tahun sebelumnya tidak mengalami perubahan yaitu tetap dimana realisasi 100 % sesuai dengan target yang ditetapkan 100 %.
2. IKU kedua, jika dibandingkan tahun sebelumnya tidak mengalami perubahan yaitu tetap dimana realisasi 100 % sesuai dengan target yang ditetapkan 100 %.
3. IKU ketiga, jika dibandingkan tahun sebelumnya mengalami kenaikan 38ndicator38 dengan target yang ditetapkan, dimana pada tahun 2020

realisasi mencapai 80,9% dari target 60%, sedangkan untuk tahun 2021 realisasi 100% dengan target 80%.

4. IKU keempat, jika dibandingkan tahun sebelumnya capaian realisasinya meningkat melebihi target yang ditetapkan, dimana pada tahun 2020 dari target 78% hanya terealisasi sebesar 74,6% sedangkan untuk tahun 2021 dari target 80 % telah tercapai 88,8%.

3. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN AKHIR PERIODE RENSTRA

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA	Kinerja Tahun 2021		Tingkat Kemajuan
			Target	Realisasi	
1	2	4	5	6	7
Meningkatnya komunikasi dan silaturahmi antar umat beragama	Persentase kejadian SARA yang tertangani	100 %	100 %	100 %	100 %
Meningkatnya partisipasi masyarakat untuk menciptakan kondisi yang aman dan tentram	Persentase Konflik Sosial yang Tertangani	100 %	100 %	100 %	100 %
Meningkatnya ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana	Persentase Kelurahan Tangguh Bencana	80 %	80 %	100 %	125 %
Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Partai Politik	Persentase Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Politik Yang Terdaftar	80 %	80 %	88,8 %	111 %

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa untuk IKU pertama dan IKU kedua yaitu persentase kejadian SARA yang tertangani dan persentase konflik sosial yang tertangani, capaian realisasi kinerja tahun

2021 terhadap target akhir renstra 2016-2021 sama yaitu sebesar 100% dengan tingkat kemajuan juga 100%.

Untuk IKU ketiga yaitu Persentase Kelurahan Tangguh Bencana realisasinya untuk tahun 2021 sebesar 100 % , sudah berada di atas target akhir renstra 2016-2021 yaitu 80%, hal ini disebabkan dari 21 kelurahan semuanya sudah terbentuk kelurahan tangguh bencana. Sedangkan untuk IKU terakhir atau keempat yaitu persentase organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik yang terdaftar, realisasinya tercapai 88,8 %, dimana angka ini sudah melebihi target akhir renstra 2016-2021 yaitu 80%. Hal ini dikarenakan dari 206 organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik yang sudah terdaftar sebanyak 183.

4. PERBANDINGAN REASLISASI KINERJA DENGAN REALISASI NASIONAL (TARGET SPM)

a. JENIS PELAYANAN DASAR

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota.

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Tramtibumlinmas daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum
- b. Pelayanan informasi rawan bencana
- c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
- d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
- e. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Adapun penjelasan jenis pelayanan dasar untuk SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat yang

diampu oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Kota Blitar, sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana
2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

1. TARGET PENCAPAIAN SPM

Target pelaksanaan SPM Bidang Trantibumlinmas sesuai dengan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota tercapai 100% dari target yang telah ditetapkan pemerintah daerah

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target 2021
1.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%
2.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%
3.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%

2. REALISASI PENCAPAIAN SPM 2021

Data pencapaian dan penerapan SPM disajikan berdasarkan realisasi program kegiatan sebagai berikut :

Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Pelayanan informasi rawan bencana adalah pelayanan informasi tentang bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana, kepada Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana. Cakupan kawasan rawan bencana adalah wilayah kabupaten/kota. Pelayanan informasi rawan bencana dibagi per jenis ancaman bencanaantara lain sebagai berikut: Gempa bumi, Tsunami, Banjir, Tanah Longsor, Letusan Gunung Api, Gelombang Laut Ekstrim, Angin Topan (termasuk Siklon Tropis/Puting Beliung), Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan, dan Epidemi/Wabah Penyakit/Zoonosis Prioritas diantaranya: rabies, anthrax, leptospirosis, brucellosis dan avian influenza (flu burung). Pada tahun 2021 ini kegiatan informasi bencana dibagi menjadi dua jenis yakni bencana alam dan penanganan masalah Covid 19

yang sedang melanda dunia dan termasuk Indonesia. Kegiatan sosialisasi informasi rawan bencana dilakukan melalui :

- Penyebarluasan informasi rawan bencana melalui medsos termasuk siaran radio,
- Penyebarluasan informasi kebencanaan melalui media cetak
- Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terlatih

Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana tahun 2021 adalah Jumlah Penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana dibanding Seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana yaitu 63.619 / 63.619 sebesar 100%.

Sesuai dengan layanan informasi bencana pada warga negara di kawasan rawan bencana sebagai berikut :

NO	KELURAHAN	JUMLAH WARGA DAERAH RAWAN BENCANA
1	KAUMAN	6.833
2	PAKUNDEN	11.587
3	KEPANJENLOR	5.777
4	TANGGUNG	6.218
5	SUKOREJO	14.792
6	NGADIREJO	3.773
7	SENTUL	8.360
8	BENDO	6.279
	TOTAL	63.619

*) Sumber data : <https://simpedak.blitarkota.go.id/>

Capaian cakupan pelayanan didukung dengan capain mutu pelayanan dasar sebagai berikut :

No	Perlengkapan pendukung	Jumlah Mutu, Barang / Jasa Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase Capaian (%)
1	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	1	1	100%
2	Melakukan sosialisasi, Komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	21	21	100%
3	Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana	260	120	46%

3. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana adalah serangkaian kegiatan pra bencana melalui pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan Warga Negara dalam menghadapi bencana. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan dibagi per jenis ancaman bencana yang dirincikan antara lain: Gempa Bumi, Tsunami, Banjir, Tanah Longsor, Letusan Gunung Api, Gelombang Laut Ekstrim, Angin Topan (termasuk Siklon Tropis/Puting Beliung), Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan, dan Epidemi/Wabah Penyakit/Zoonosis Prioritas diantaranya: rabies, anthrax, leptospirosis, brucellosis dan avian influenza (flu burung).

Pada tahun 2021 ini kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana difokuskan pada penanganan masalah Covid 19 yang sedang melanda dunia dan termasuk Indonesia.

Persentase Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana tahun 2021 adalah Jumlah Warga Negara yang

memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dibanding Jumlah Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana yaitu 63.619 / 63.619 sebesar 100%.

4. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana tahun 2021 adalah 100%. Pada tahun 2021 ini kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban bencana terbagi menjadi 3 fokus. Fokus yang pertama pada penanganan bencana alam hidrometeorologi berupa penanganan tanah longsor, cuaca ekstrim, angin puting beliung sebanyak 115 titik. Fokus yang kedua yaitu penanganan covid 19. Evakuasi pasien yang harus melaksanakan isolasi di Rumah Isolasi milik Pemerintah Kota Blitar sejumlah 168 orang. Sedangkan evakuasi pasien covid 19 yang meninggal sebanyak 38 orang. Dan fokus yang ketiga adalah penanganan gempa bumi dengan kekuatan III MMI yang terjadi 2 kali dan diikuti beberapa kali gempa susulan dengan korban luka berat dan ringan masing-masing 1 (satu) orang dan 175 bangunan rusak mulai ringan hingga berat.

Kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dilakukan dengan Penanganan dampak cuaca ekstrim berupa pohon tumbang, banjir luapan, banjir genangan, longsor dan ambrolnya talut serta penanganan dampak wabah covid-19 berupa evakuasi pasien isolasi mandiri ke rumis, pemakaman SOP covid-19, evakuasi jenazah covid yang sedang isolasi mandiri di rumah. Persentase Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana tahun 2021 adalah Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dibanding Jumlah Warga Negara yang menjadi korban bencana yaitu 1.436 / 1.436 sebesar 100%.

Capaian cakupan pelayanan didukung dengan capain mutu pelayanan dasar sebagai berikut :

No	Perlengkapan pendukung	Jumlah Mutu, Barang / Jasa Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase Capaian (%)
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	225	225	100%
2	Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	225	225	100%
3	Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana	13	13	100%
4	Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	2	2	100%
5	Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis perioritas	2.047	2.047	100%

5. ALOKASI ANGGARAN

Untuk mendukung pencapaian SPM ditetapkan program kegiatan sebagai berikut :

Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan
Penyusunan rencana penanggulangan bencana Kab / Kota	56.540.250	10.741.200	19%
Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kab/kota	153.537.450	135.723.000	88,40%
Pengendalian operasi dan penyediaan Sarpras kesiapsiagaan terhadap bencana Kab/Kota	184.529.100	64.416.720	34,91%
Respon Cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas	605.909.700	605.909.700	100%

6. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

- a. Untuk permasalahan Pengumpulan Data
Belum terdokumentasinya dengan baik, data terkait pencegahan dan penanganan bencana. Hal ini disebabkan ritme pekerjaan yang tidak bisa diprediksi sehingga perlu adanya penataan tugas personil yang menangani data dan informasi bencana.
- b. Untuk permasalahan Perencanaan dan Penganggaran
- c. Untuk permasalahan Pelaksanaan, beban tugas pencegahan dan penanganan bencana yang idealnya ditangani oleh 3 (tiga) bidang hanya diampu oleh 1 (satu) bidang. Sehingga perlu dibentuk badan tersendiri yang menangani bencana.
- d. Untuk permasalahan Pelaporan, Laporan pelaksanaan kegiatan belum dilakukan secara rutin sehingga laporan pelaksanaan kegiatan akan dilakukan secara rutin.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Keberhasilan capaian Indicator kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan, tidak terlepas dari dukungan dana untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja utama Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar. Tabel di bawah ini menyajikan data belanja tidak langsung dan belanja langsung Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2021.

Tabel 3.4
Realisasi Anggaran Belanja

No.	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
1.	Belanja Daerah	9.140.255.883,00	7.513.826.898,00	82,21
	Jumlah	9.140.255.883,00	7.513.826.898,00	82,21

Rincian untuk realisasi anggaran belanja langsung seperti tabel di bawah ini:

Tabel 3.5
Realisasi Anggaran untuk
Setiap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun 2021

a. Urusan Pemerintahan Umum

NO	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.099.499.428,00	3.326.577.953,00	81,15
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42.020.400,00	41.913.400,00	99,75
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.510.200,00	8.510.200,00	100
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	33.510.200,00	33403.200,00	99,68
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.417.430.028,00	2.700.896.428,00	79,03
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.408.865.228,00	2.692.331.628,00	78,98
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	8.564.800,00	8.564.800,00	100
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	43.076.800,00	39.723.000,00	92,21
1.3.1	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	43.076.800,00	39.723.000,00	92,21
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	330.777.800,00	308.062.613,00	93,13
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.549.400,00	10.549.400,00	100
1.4.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.702.600,00	15.702.600,00	100
1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	47.448.900,00	47.448.900,00	100
1.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	39.051.400,00	39.051.400,00	100
1.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7.440.000,00	7.440.000,00	100
1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	210.585.500,00	187.870.313,00	89,21
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44.895.900,00	44.355.612,00	98,80
1.5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	43.393.500,00	42.853.212,00	98,75
1.5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.502.400,00	1.502.400,00	100

1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	221.298.500,00	191.626.900,00	86,59
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	143.787.100,00	114.321.500,00	79,51
1.6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.888.400,00	20.888.400,00	100
1.6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	35.280.000,00	35.280.000,00	100
1.6.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	21.343.000,00	21.137.000,00	99,03
2.	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	622.669.700,00	528.187.800,00	84,83
2.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	622.669.700,00	528.187.800,00	84,83
2.1.1	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	543.559.700,00	452.265.300,00	83,20
2.1.2	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	79.110.000,00	75.922.500,00	95,97
3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	862.184.175,00	775.801.475,00	89,98
3.1	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	862.184.175,00	775.801.475,00	89,98

3.1.1	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	749.026.175,00	670.701.275,00	89,54
3.1.2	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	113.158.000,00	105.100.200,00	92,88
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	82.475.700,00	50.056.300,00	60,69
4.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	82.475.700,00	50.056.300,00	60,69
4.1.1	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	82.475.700,00	50.056.300,00	60,69
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	1.705.576.600,00	1.608.321.000,00	94,30
5.1	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	1.705.576.600,00	1.608.321.000,00	94,30
5.1.1	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	367.116.000,00	364.243.200,00	99,22
5.1.2	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1.338.460.600,00	1.244.077.800,00	92,95
6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	324.871.300,00	158.702.400,00	48,85

6.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	324.871.300,00	158.702.400,00	48,85
6.1.1	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	251.960.800,00	98.833.500,00	39,23
6.1.2	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	72.910.500,00	59.868.900,00	82,11

b. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.442.978.980,00	1.066.179.970,00	73,89
7.1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	338.066.550,00	200.139.720,00	59,20
7.1.1	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	153.537.450,00	135.723.000,00	88,40
7.1.2	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	184.529.100,00	64.416.720,00	34,91
7.2	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.048.372.180,00	855.299.050,00	81,58
7.2.1	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1.048.372.180,00	855.299.050,00	81,58
7.3	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	56.540.250,00	10.741.200,00	19
7.3.1	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	56.540.250,00	10.741.200,00	19

1. Alokasi Per-Sasaran Pembangunan

Tabel 3.6
Alokasi Per-Sasaran Pembangunan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	% Anggaran
1	2	3	4
Meningkatnya komunikasi dan silaturahmi antar umat beragama	Persentase kejadian SARA yang tertangani	622.699.700,00	6,8
Meningkatnya partisipasi masyarakat untuk menciptakan kondisi yang aman dan tentram	Persentase Konflik Sosial yang Tertangani	2.030.447.900,00	22,2
Meningkatnya ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana	Persentase Kelurahan Tangguh Bencana	1.442.978.980,00	15,8
Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Partai Politik	Persentase Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Politik Yang Terdaftar	944.659.875,00	10,3
JUMLAH		5.040.786.455,00	55,1

Total alokasi anggaran untuk keempat sasaran pembangunan adalah Rp **5.040.786.455,00** atau **55,1%** dari total jumlah anggaran tahun 2021 yaitu Rp **9.140.255.883,00**, dengan rincian untuk sasaran pembangunan pertama : Meningkatnya komunikasi dan silaturahmi antar umat beragama mendapat anggaran Rp 622.699.700,00 atau 6,8%. Sasaran kedua: Meningkatnya partisipasi masyarakat untuk menciptakan kondisi yang aman dan tentram mempunyai anggaran sebesar Rp 2.030.447.900,00 atau 22,2%. Sasaran ketiga yaitu Meningkatnya ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana, anggaran yang diperoleh Rp 1.442.978.980,00 atau 15,8%. Sasaran terakhir atau keempat adalah Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Partai Politik dengan anggaran Rp 944.659.875,00 atau 10,3%.

Tabel 3.7
Anggaran Belanja Daerah pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dibandingkan dengan Keseluruhan Anggaran Belanja Daerah Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	% Anggaran
1	2	3	4
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tersusun tepat waktu dan sesuai dengan aturan	4.099.499.428,00	44,9
	Tingkat partisipasi Daerah dalam Agenda Kota		
	Persentase kecukupan Pelayanan Perkantoran		
JUMLAH		4.099.499.428,00	44,9

2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Tabel 3.7
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran/ Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Tar-get (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
Sasaran 1							
Meningkatnya komunikasi dan silaturahmi antar umat beragama	Persentase kejadian SARA yang tertangani	100	100	100	622.669.700	528.187.800	84,83
Program 1.1							
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase penduduk usia 14 - 59 Tahun yang mengikuti wawasan kebangsaan	100	100	100	622.669.700	528.187.800	84,83
Sasaran 2							
Meningkatnya partisipasi masyarakat untuk menciptakan kondisi yang aman dan tentram	Persentase Konflik Sosial yang Tertangani	100	100	100	2.030.447.900	1.767.023.400	87,03
Program 2.1							

Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase penanganan penyakit masyarakat	100	100	100	1.705.576.600	1.608.321.000	94,30
Program 2.2							
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase potensi Konflik Sosial yang terselesaikan	100	100	100	324.871.300	158.702.400	48,85
Sasaran 3							
Meningkatnya ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana	Persentase Kelurahan Tangguh Bencana	80	100	125	1.442.978.980	1.066.179.970	73,89
Program 3.1							
Program Penanggulangan Bencana	Persentase tertanganinya kejadian bencana	100	100	100	1.442.978.980	1.066.179.970	73,89
Sasaran 4							
Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Partai Politik	Persentase Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Politik Yang Terdaftar	80	88,8	111	944.659.875	825.857.775	87,42
Program 4.1							
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Penduduk pemilih yang menggunakan hak pilihnya	82	85	103,6	862.184.175	775.801.475	89,98
Program 4.2							
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas/ orpol yang dibina sesuai aturan	80	88,8	111	82.475.700	50.056.300	60,69

3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.8
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	Indikator Sasaran	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya komunikasi dan silaturahmi antar umat beragama	Persentase kejadian SARA yang tertangani	100	84,83	1,18
Meningkatnya partisipasi masyarakat untuk menciptakan kondisi yang aman dan tentram	Persentase Konflik Sosial yang Tertangani	100	87,03	1,15
Meningkatnya ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana	Persentase Kelurahan Tangguh Bencana	125	73,89	1,69
Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Partai Politik	Persentase Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Politik Yang Terdaftar	111	87,42	1,27

Keterangan:

≥ 1 = efisien

< 1 = tidak efisien

C. PRESTASI/PENGHARGAAN

Dalam kurun waktu tahun 2021 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Kota Blitar telah mendapatkan prestasi/ penghargaan dari hasil Evaluasi SAKIP memperoleh ranking 7 (tujuh) dengan nilai 84,96 kategori A (memuaskan).

A. KESIMPULAN

Dari analisis hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja dapat disimpulkan bahwa secara umum Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Kota Blitar pada Tahun 2021 mampu merealisasikan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari realisasi capaian empat indikator kinerja utama Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Kota Blitar Tahun 2021 sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berikut uraian target dan realisasi capaian kinerja untuk setiap sasaran:

1. Sasaran I

Meningkatnya komunikasi dan silaturahmi antar umat beragama

Indikator sasaran: Persentase kejadian SARA yang tertangani

Target : 100 %

Realisasi : 100 %

Capaian kinerja : 100 %

Pada sasaran I ini terindikasi potensi konflik SARA di Kota Blitar dengan adanya aktifitas yang diduga aktivitas keagamaan menyimpang dan aktifitas tempat ibadah. Agar potensi ini tidak berkembang menjadi konflik SARA maka dilakukan mediasi dan koordinasi rembug antar pihak yang terkait dan FKUB.

2. Sasaran II

Meningkatnya partisipasi masyarakat untuk menciptakan kondisi yang aman dan tentram

Indikator sasaran: Persentase Konflik Sosial yang Tertangani

Target : 100 %

Realisasi : 100 %

Capaian kinerja : 100 %

Permasalahan yang ada pada sasaran II ini adalah maraknya konflik terkait masalah sosial, ekonomi, infrastruktur di Kota Blitar. Perbedaan persepsi antara pihak ketiga, masyarakat, dan instansi terkait. Kendala yang dihadapi masih kurangnya pemahaman terkait regulasi yang mengatur dan

adanya traumatik masyarakat terhadap keberadaan status tertentu karena dianggap mengganggu/mengancam kehidupan masyarakat. Kebijakan yang diambil untuk permasalahan tersebut diantaranya sosialisasi tentang regulasi yang mengatur, penertiban sesuai dengan aturan yang berlaku, mediasi dan koordinasi rembug antar pihak yang terkait.

3. Sasaran III

Meningkatnya ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana

Indikator sasaran: Persentase Kelurahan Tangguh Bencana

Target : 80 %

Realisasi : 100 %

Capaian kinerja : 125 %

Dengan sudah terbentuknya 21 kelurahan tangguh tentunya perlu terus adanya pemdampingan lebih intensif dengan melibatkan peran relawan, organisasi kebencanaan, PMI, Tagana, MMDMC, dan Pramuka.

4. Sasaran IV

Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Partai Politik

Indikator sasaran: Persentase Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Politik Yang Terdaftar

Target : 80 %

Realisasi : 88,8 %

Capaian kinerja : 111 %

Perlunya pemantauan dan pengawasan untuk terus meningkatkan kesadaran pengurus Ormas/LSM untuk mentaati peraturan yang berlaku. Solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut diantaranya dengan sosialisasi aplikasi database Ormas/LSM dan membentuk Tim Pengawasan Ormas dan memberikan pembinaan kepada Ormas/LSM secara berkala.

Hasil dari analisis pengukuran kinerja ini dapat digunakan sebagai pijakan penentuan kebijakan berikutnya untuk tetap konsisten dalam jalur pewujudan **Good Governance**

B. LANGKAH PERBAIKAN

Langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Kota Blitar berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan komunikasi dan silaturahmi antar umat beragama
Langkah perbaikan yang dilakukan:

Meningkatkan Koodinasi aktif dengan Forum Kerukunan Umat Bergama (FKUB)

2. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat untuk menciptakan kondisi yang aman dan tentram

Langkah perbaikan yang dilakukan:

Melakukan mediasi/rembug kepada masyarakat dalam menangani Konflik social/masyarakat yang terjadi/muncul dan bekerjasama dengan instansi terkait

3. Mengoptimalkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana

Langkah perbaikan yang dilakukan:

Pendampingan lebih intensif kepada kelurahan tangguh bencana yang sudah terbentuk dengan melibatkan peran relawan, organisasi kebencanaan, PMI, Tagana, MMDMC, dan Pramuka.

4. Meningkatkan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Partai Politik
Langkah perbaikan yang dilakukan:

Sosialisasi aplikasi data base organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik.

Demikian beberapa hal yang dapat disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Kota Blitar Tahun 2021, semoga dapat memberikan informasi yang jelas akan capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Kota Blitar. Mengingat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) akan dipergunakan secara terus menerus dan saling terkait dalam system informasi dan system manajemen instansi pemerintah, maka diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang disusun oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Kota Blitar akan

mendapat masukan positif dan konstruktif dari berbagai pihak yang terkait sehingga dapat dijadikan acuan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan keberkahan dan kasih sayang-NYA sehingga kita memiliki kekuatan dan kemampuan untuk bersama-sama membangun Kota Blitar dengan tulus ikhlas dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah menuju peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Kota Blitar.

Blitar, Januari 2022

Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Blitar

TOTO ROBANDIYO, S.Sos.,M.Si.

Pembina Tk.I

NIP. 196612041996031004